

Katalog: 9102059.1371



SENSUS EKONOMI 2016

HASIL ANALISIS *LISTING*

POTENSI EKONOMI KOTA PADANG



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PADANG**

SENSUS EKONOMI 2016

HASIL ANALISIS *LISTING*

POTENSI EKONOMI KOTA PADANG



<https://kota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil *Listing* Potensi Ekonomi Kota Padang

ISBN : 978-602-0919-95-9
No. Publikasi : 13710.1720
Katalog BPS : 9102059.1371
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xi + 107

Naskah :
BPS Kota Padang

Gambar Kulit :
BPS Kota Padang

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Kota Padang

Dicetak Oleh :
CV Sarana Multi Abadi (Cetakan : I)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengemunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Padang (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 43 huruf b)

Tim Penyusun

Pengarah

Rizal, S.ST

Editor

Armalia Desiyanti, S.ST

Penulis

Armalia Desiyanti, S.ST

Pengolah Data

Armalia Desiyanti, S.ST

Desain dan Tata Letak Layout

Armalia Desiyanti, S.ST

Kontributor Data

Seksi Statistik Sosial

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Kata Pengantar



Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Pelaksanaan SE2016 dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah listing atau pendaftaran usaha/perusahaan (SE2016-L). Listing merupakan kegiatan pendataan secara lengkap seluruh kegiatan unit usaha/perusahaan di wilayah Kota Padang kecuali kegiatan Pertanian, Kehutanan, & Perikanan dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai unit usaha/perusahaan beserta karakteristik usahanya. Dengan ketersediaan data yang lengkap mencakup seluruh wilayah Kota Padang, maka hasil SE2016-L dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang potensial baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun penyediaan lapangan usaha.

Publikasi Potensi Ekonomi Kota Padang 2016 ditujukan untuk memperoleh gambaran dan informasi kategori ekonomi potensi dan unggulan di Kota Padang. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengevaluasi program-program terkait pengembangan potensi ekonomi yang sudah dilakukan selama ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-L hingga penyusunan publikasi ini dapat terlaksana. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada segenap penggunanya.

Padang, Desember 2017
Kepala Badan Pusat statistik
Kota Padang

RIZAL

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

Kategori Cakupan Sensus Ekonomi 2016

Kategori B,D,E.	Pertambangan, Ebergi, Pengelolaan Air dan Limbah
Kategori C.	Industri Pengolahan
Kategori F.	Konstruksi
Kategori G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Kategori H.	Pengangkutan dan Pergudangan
Kategori I.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
Kategori J.	Informasi dan Komunikasi
Kategori K.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi
Kategori L.	Real Estat
Kategori M,N.	Jasa Perusahaan
Kategori P.	Pendidikan
Kategori Q.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
Kategori R,S,U.	Jasa Lainnya

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Bab 1	1
Potensi Ekonomi Kota Padang	
1. Sumber Daya Manusia yang Melimpah	3
2. Perekonomian Kota Padang Cukup Stabil dalam 5 Tahun Terakhir	7
3. Penggerak Utama Perekonomian Kota Padang	9
Bab 2	11
Tantangan Pembangunan Ekonomi Kota Padang	
1. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Rendah	13
2. Infrastruktur Ekonomi yang Terbatas	14
Bab 3	15
Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Pemerataan Pembangunan	
1. Optimalisasi Sektor Potensial untuk Pemerataan Pembangunan	17
2. Potensi Ekonomi Kota Padang	19
3. Hasil Pengukuran Potensi Ekonomi Kota Padang	20
Bab 4	25
SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG: TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	
1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Transportasi	27
2. Sarana Penunjang Transportasi Padang	29
Bab 5	33
SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG: JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	
1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	35

2. Sarana Penunjang Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Kota Padang	37
Bab 6	39
SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG: AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	
1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	41
2. Sarana Penunjang Aktivitas Kesehatan dan Sosial di Kota Padang	43
Bab 7	47
SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG: PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	
1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	49
2. Sarana Penunjang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di Kota Padang	51
Bab 8	55
SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG: INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Informasi dan Komunikasi	57
2. Sarana Penunjang Sektor Informasi dan Komunikasi di Kota Padang	59
Bab 9	61
SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG: REAL ESTATE	
1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Real Estate	63
2. Sarana Penunjang Real Estate di Kota Padang	65
Bab 10	67
SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG: JASA PERUSAHAAN	
1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Jasa Perusahaan	69

	Bab 11	73
	SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG: JASA LAINNYA	
1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Jasa Lainnya		75
	Bab 12	79
	SEKTOR LAINNYA	
1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Konstruksi		81
2. Sektor Perdagangan sebagai Sektor Dominan di Kota Padang		83
3. Sektor Pendidikan Penyedia Lapangan Kerja Sekaligus Pencetak Modal Manusia Unggul		86
	Catatan Teknis	93
	Lampiran	89



bab

1



<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

Potensi Ekonomi Kota Padang

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

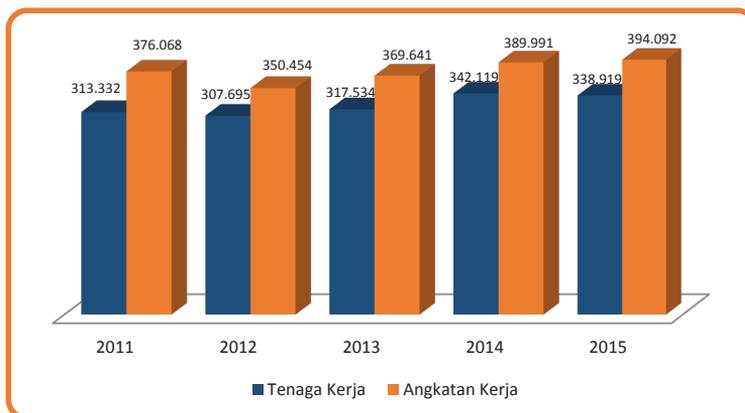
Potensi Ekonomi Kota Padang

1. Sumber Daya Manusia yang Melimpah

Tenaga Kerja Padang secara Kuantitas

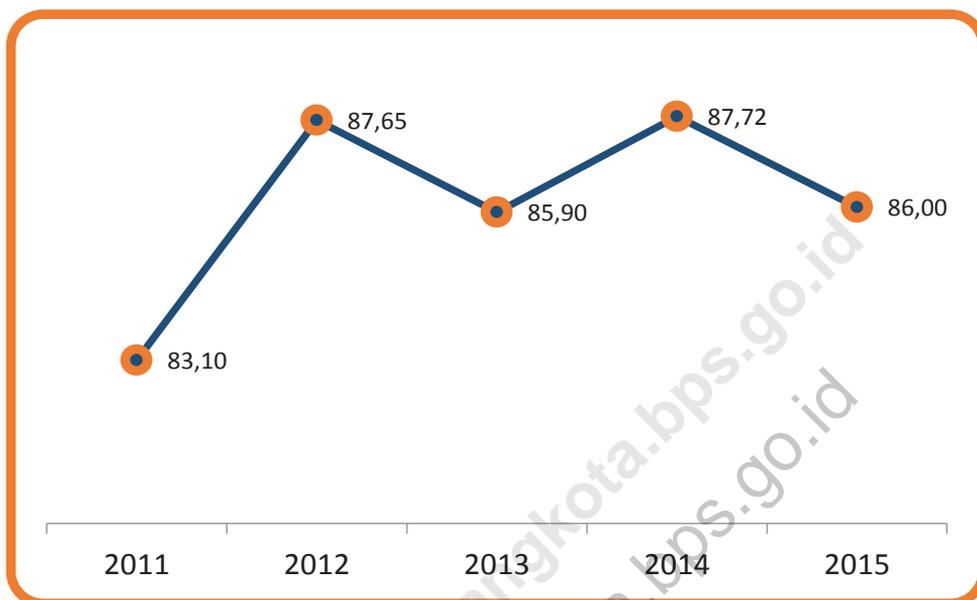
Menghadapi polemik perekonomian secara global, tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memainkan perannya sebagai faktor produksi. Menurut Gomes (1997), Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Oleh karena itu, SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi bagi suatu daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas dari SDM dipengaruhi oleh peningkatan pendidikan dan keterampilan, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Kota Padang dengan jumlah penduduk pada 2015 sekitar 902.413 jiwa, maka Kota Padang tidak kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja. Jumlah penduduk Kota Padang dengan dukungan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan daya saing Kota Padang.

Gambar 1.1
Jumlah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja di Kota Padang (orang)
2011-2015



Sumber: BPS, Sakernas, 2011-2015

Gambar 1.2.
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Padang, 2011-2015



Sumber: BPS, Sakernas, 2011-2015

Jumlah angkatan kerja menggambarkan penawaran tenaga kerja yang tersedia untuk suatu perusahaan/usaha/instansi/lembaga di wilayah tersebut. Di Kota Padang jumlahnya dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Prof. Soemitro Djojohadikusumo mendefinisikan angkatan kerja (labor force) sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja sering diistilahkan dengan kesempatan kerja. Menurut Sumarsono (2003:41) memberikan definisi bahwa kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (employment) dan masih lowongan (vacancy).

Gambar 1.1 dan 1.2 yang disajikan di atas memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, di tahun 2015 jumlah angkatan kerja di Kota Padang berjumlah sekitar 394,09 ribu orang, dan dari jumlah tersebut ada sekitar 338,92 ribu orang merupakan penduduk yang bekerja. Dengan kata lain, tingkat kesempatan kerja pada tahun 2015 sebesar 86,00 persen sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. Angka tersebut juga dapat diartikan dari setiap 100 orang angkatan kerja, 86 orang diantaranya sudah memiliki pekerjaan. Kemampuan suatu daerah dalam penyerapan tenaga kerja tergantung pada penyediaan dari bahan-bahan pelengkap produksi misalnya modal, bahan mentah/bahan baku, dan lain-lain. Modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha berupa uang atau barang. Barang investasi seperti mesin-mesin yang dioperasikan manusia,

akan menambah tingkat penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Hubungan inilah yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dalam mengatasi jumlah pengangguran. Sederhananya, apabila terjadi penambahan angkatan kerja pada suatu daerah harus ada upaya untuk mengimbangi dengan besarnya investasi agar dapat menciptakan kesempatan kerja baru.

Usaha Mikro Kecil menjadi Sumber Mata Pencaharian Utama

Ketersediaan lapangan pekerjaan harus didukung oleh tingkat pendidikan penduduk agar lebih produktif dalam proses produksi. Namun di tahun 2015, tenaga kerja di Kota Padang mayoritas berpendidikan SMP. Hal ini akan menimbulkan tingginya pengangguran penduduk berpendidikan di atas SMP sebagai akibat dari tidak tertampungnya tenaga profesional dengan keahlian khusus. Akan tetapi, dilihat dari sisi positifnya bahwa tidak tertampungnya tenaga profesional akan menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor informal.

Kegiatan sektor informal sering juga disebut sebagai *underground economy* (Gerxhani 2000). Kata *underground* disini maksudnya bahwa sektor informal tidak hanya kegiatan legal saja tapi bisa mencakup kegiatan ilegal. Usaha-usaha di sektor informal mencakup aktivitas ekonomi mikro dan kecil yang tidak terdaftar baik oleh pemerintah maupun otoritas lainnya. Pada umumnya, usaha informal tidak mengikuti peraturan berkaitan dengan ketenagakerjaan, pajak atau memiliki ijin. Morrisson (1995), mengemukakan untuk memahami sektor

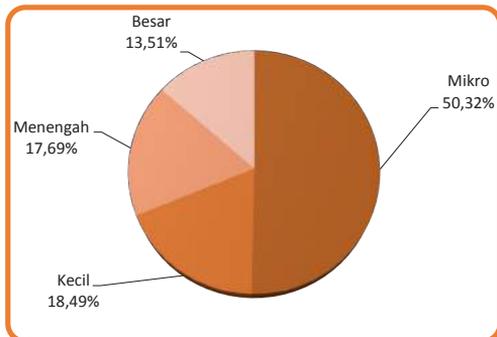
informal, 3 hal harus diperhatikan :

1. Ukuran. Dari segi ukuran sektor informal adalah mereka yang berusaha sendiri atau usaha mikro yang mempunyai pekerja tidak lebih dari 20 orang.
2. Kelembagaan yang informal. Dari segi kelembagaan/aturan sektor informal mencakup perusahaan yang tidak terdaftar atau tidak memenuhikewajiban administrasi legal seperti, kesehatan kerja, pajak dan hujum perburuhan.
3. Modal yang terbatas. Baik modal fisik maupun modal manusia per pekerja di sektor informal adalah rendah dan bahkan sangat terbatas. Dengan kata lain sedikit sekali menggunakan modal fisik dan modal manusia yang berkualitas.

Kegiatan informal mempunyai karakteristik antara lain: berskala kecil, dimiliki oleh individu atau keluarga, menggunakan teknologi yang sederhana, bersifat padat tenaga kerja, pendidikan dan keahlian tenaga kerja rendah, dan tingkat upah yang relatif rendah pula (Bappenas, 2009). Keberadaan dan kelangsungan kegiatan informal di dalam perekonomian Kota Padang merupakan realitas yang juga berperan dalam menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja. Kegiatan informal mampu menampung tenaga kerja dengan keahlian yang kurang. Sebagai dampak positif kegiatan informal adalah berkurangnya pengangguran.

Kegiatan informal biasanya merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memang menjadi andalan penduduk di Kota Padang. Usaha kecil di sektor informal memang bukan pilihan usaha yang terbaik

Gambar 1.3.
**Komposisi Tenaga Kerja Usaha/
 Perusahaan Menurut Skala Usaha
 di Kota Padang, 2015**



Sumber : Hasil SE2016 Listing

tapi dianggap pilihan kedua yang terbaik (*second best*). Berdasarkan hasil SE2016, jumlah tenaga kerja UMK nonpertanian tercatat sebanyak 68,80 persen. Hal ini jelas menunjukkan bahwa usaha kecil di sektor informal memang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Dan tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran.

Selanjutnya dilihat dari tiap kategori lapangan usaha, kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan kategori lapangan usaha yang lain yakni sebanyak 79.177 orang atau sekitar 30,32 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor lebih diminati oleh pemilik modal usaha mikro kecil dilatar belakangi posisi Kota Padang sebagai salah satu pusat perdagangan di Sumatera Barat. Khusus aktivitas pendidikan, mayoritas usaha diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat nonprofit, yang secara konsep

dikategorikan sebagai UMK sehingga tenaga kerja yang digunakan menambah jumlah tenaga kerja UMK.

Sebaran menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan bahwa secara total, sentralisasi tenaga kerja berada di kota Padang. Kota Padang merupakan kota yang paling banyak menyerap tenaga kerja baik pada UMK maupun UMB. Total tenaga kerja non pertanian baik pada UMK maupun UMB di kota Padang sebanyak 261.146 orang atau 20,9 persen dari tenaga kerja UMK dan UMB di Sumatera Barat. Sebanyak 16,57 persen atau 179.677 orang tenaga kerja UMK Sumatera Barat berada di kota Padang.

UMK tidak hanya merupakan tumpuan mata pencaharian penduduk Kota Padang tetapi juga sumber aktivitas yang memperkuat sendi perekonomian baik pada tingkat nasional maupun regional. Beberapa penelitian membuktikan bahwa UMK merupakan usaha yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi terhadap guncangan ekonomi global. Proteksi ekonomi dan penguatan investasi pada skala usaha mikro kecil harus tetap diperkuat untuk mendukung keberlanjutan perekonomian bangsa.

Sementara itu, bagi UMB stimulasi investasi di Kota Padang sudah selayaknya diperkuat dengan Kota Padang tetap terjaga. Hal ini ditengarai dengan masih sedikitnya tenaga kerja non pertanian pada UMB di Kota Padang. Pembangunan berbasis sumber daya ekonomi lokal diharapkan tetap menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Tidak hanya untuk pemerataan ekonomi, tetapi juga

ditujukan untuk pemerataan kualitas sumber daya manusia.

Dari data-data tersebut, sudah selayaknya pemerintah daerah memberi perhatian penuh kepada usaha mikro kecil agar dapat memperkuat perekonomian daerah Kota Padang. Perhatian yang sangat dibutuhkan tentunya berupa modal uang/barang bisa dalam bentuk pinjaman berjangka ataupun bantuan untuk usaha mikro kecil. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan khusus kepada pemilik usaha mikro kecil bagaimana usaha yang mereka jalankan dapat berkembang pesat dan tidak hanya dijual di dalam kota tapi juga bisa memenuhi permintaan di luar daerah Kota Padang.

2. Perekonomian Kota Padang Cukup Stabil dalam 5 Tahun Terakhir.

Krisis global yang terjadi periode 1997-1998 mempengaruhi perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Peristiwa ini sering disebut krisis moneter “krismon” di Indonesia. Ada beberapa penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia. Pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Kedua, banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan Indonesia. Ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik. Hal itu menyebabkan semakin lemahnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika bulan Agustus 1997 hingga dan berlanjut di tahun 1998. Lalu, sepuluh tahun kemudian yakni di tahun 2008, Indonesia juga terkena imbas *sub-prime mortgage*

meskipun tidak separah tahun 1997-1998.

Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia tentunya berimbas pada seluruh kab/kota yang ada di Indonesia, termasuk Kota Padang. Jika kita lihat pola yang terjadi, beberapa kalangan ekonomi meramalkan akan adanya kemungkinan krisis ekonomi akan melanda di Indonesia tahun 2018. Namun, krisis biasanya tidak terjadi begitu saja. Beberapa kelemahan struktural yang umumnya menjadi penyebab krisis adalah kerentanan di sektor keuangan seperti terlalu tingginya utang, baik pemerintah maupun swasta, melemahnya harga komoditas ekspor utama, pelarian modal secara besar-besaran dan serentak, dan ringkihnya sektor perbankan.

Akan tetapi, karena faktor fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat setelah menghadapi krisis pada tahun 1997-1998, imbas krisis tersebut tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dilihat dari level regional, Sumatera Barat secara umum dan khususnya Kota Padang pun mengalami hal yang serupa. Keberadaan UMKM yang mendominasi perekonomian Kota Padang turut andil menjaga stabilitas ekonomi regional dan nasional.

Kembali kita membahas perekonomian Kota Padang, tentunya pun dipengaruhi oleh perekonomian nasional. Perekonomian Kota Padang pada lima tahun terakhir paling stabil, meski ada perlambatan laju pertumbuhannya, tapi tidak terlalu tajam. Pelaku utama perekonomian Kota Padang kebanyakan adalah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, bergerak pada usaha

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2011-2016

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[01] Kepulauan Mentawai	5,28	5,37	5,77	5,57	5,19	5,01
[02] Pesisir Selatan	5,77	5,82	5,90	5,80	5,73	5,30
[03] Solok	4,40	6,43	5,63	5,79	5,43	5,30
[04] Sijunjung	6,11	6,15	6,14	6,02	5,68	5,25
[05] Tanah Datar	5,84	5,61	5,85	5,79	5,31	5,01
[06] Padang Pariaman	5,85	5,94	6,20	6,05	6,13	5,50
[07] Agam	6,01	6,18	6,15	5,92	5,51	5,40
[08] Lima Puluh Kota	6,56	6,15	6,23	5,98	5,58	5,31
[09] Pasaman	5,36	6,01	5,82	5,87	5,33	5,06
[10] Solok Selatan	5,58	6,04	6,13	5,90	5,35	5,11
[11] Dharmasraya	6,56	6,19	6,51	6,34	5,75	5,39
[12] Pasaman Barat	6,33	6,33	6,40	6,04	5,69	5,32
[71] Padang	6,23	6,16	6,66	6,46	6,39	6,21
[72] Kota Solok	6,90	6,76	6,44	6,01	5,97	5,75
[73] Sawahlunto	5,45	5,53	6,11	6,08	6,02	5,71
[74] Padang Panjang	6,31	5,97	6,29	6,08	5,91	5,79
[75] Bukittinggi	6,12	6,55	6,28	6,20	6,12	6,04
[76] Payakumbuh	6,91	6,62	6,56	6,47	6,19	6,08
[77] Pariaman	5,94	6,13	6,06	5,99	5,78	5,58
Sumatera Barat	6,34	6,31	6,08	5,88	5,52	5,26

Sumber : BPS Kota Padang, PDRB Menurut Lapangan Usaha

simpan pinjam, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada periode 2013-2016 tumbuh di atas rata-rata Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan perekonomian Kota Padang cukup stabil untuk kawasan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

pada umumnya mengalami perlambatan selama enam tahun terakhir. Perekonomian Kota Padang sendiri relatif masih stabil dalam menghadapi gejala perekonomian yang ada. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonominya yang masih berada di atas 6 (enam) persen di tahun 2016.

Keberadaan UMKM di Kota Padang turut andil menjaga perekonomian di

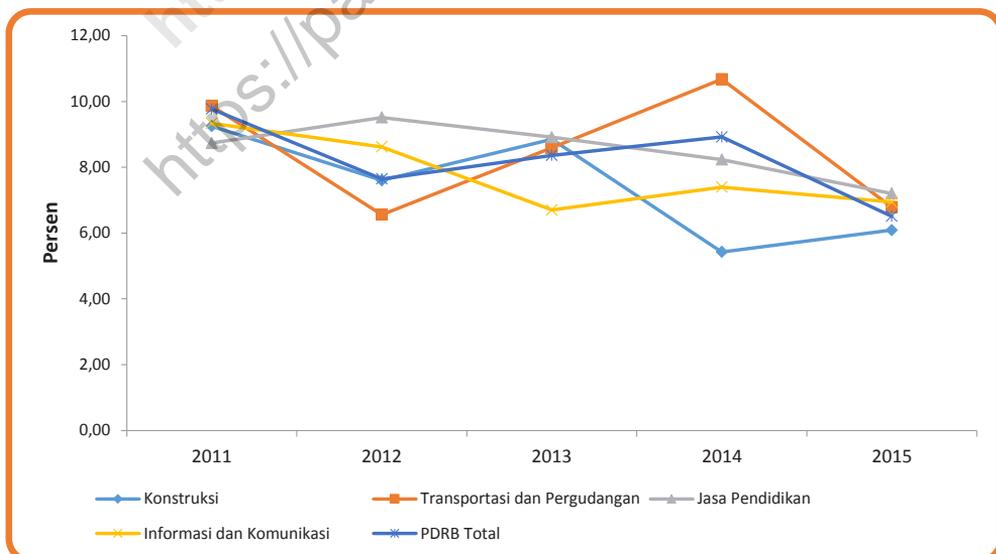
Sumatera Barat khususnya di Kota Padang tetap stabil dan bertahan dari gejolak perekonomian global. Pada umumnya usaha UMKM menggunakan bahan baku lokal sehingga tidak terlalu terpengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah. Disamping itu modal usaha ini tidak ditopang pinjaman dari perbankan, sehingga kenaikan suku bunga tidak berdampak signifikan. Disamping itu, menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari krisis global tidak mempengaruhi penurunan omzet UMKM. Hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan UMKM dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dengan kata lain UMKM telah menjadi *buffer zone* yang mampu menyelamatkan negara dari penurunan ekonomi yang lebih dalam.

3. Penggerak Utama Perekonomian Kota Padang

Dari hasil SE2016, jumlah usaha/perusahaan di Kota Padang tercatat sebanyak 93,652 ribu unit usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Ekonomi 2006 yang sebanyak 90,812 ribu usaha/perusahaan menjadi 93,652 ribu usaha atau meningkat sebesar 3,13 persen. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis *online* turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Padang beberapa tahun belakangan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian daerah juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan komunikasi, dan Jasa Pendidikan adalah kategori usaha yang belakangan ini berpotensi menjadi penguat keberlangsungan

Gambar 1.4
Pertumbuhan PDRB Beberapa Kategori Lapangan Usaha di Kota Padang, Tahun 2011-2015

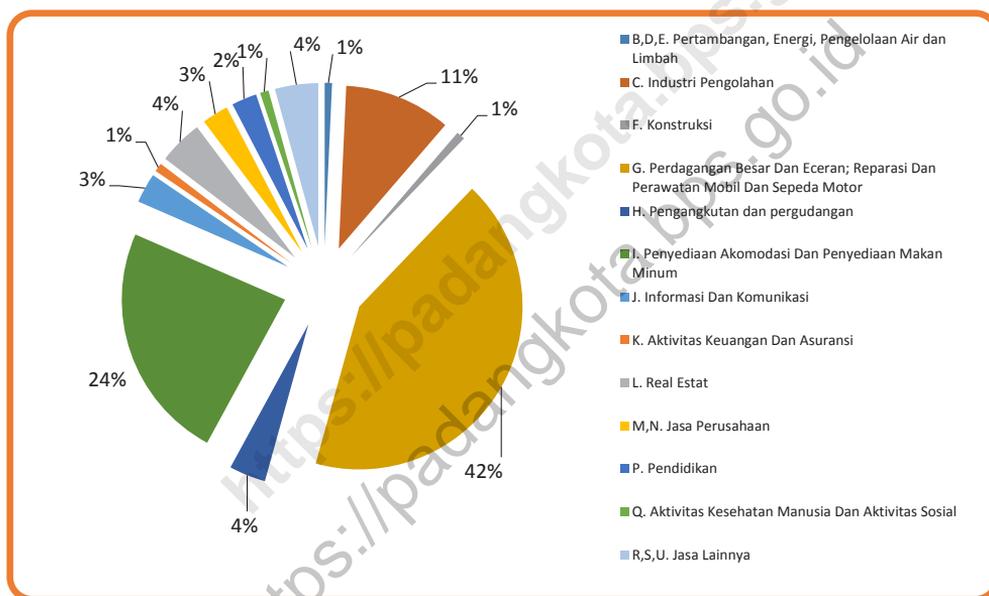


Sumber : BPS Kota Padang, PDRB Menurut Lapangan Usaha (tanpa kategori A)

pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Capaian pertumbuhan ekonomi kategori tersebut cukup tinggi dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang mencapai 6,51 persen pada 2015. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup menggembirakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

terbesar kedua dan ketiga yang dijalankan oleh masing-masing sekitar 23,63 persen usaha/perusahaan dan 10,57 persen usaha/perusahaan. Ketiga kategori usaha tersebut juga menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan kategori lapangan usaha lainnya.

Gambar 1.5. Distribusi Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha di kota Padang (persen)



Sumber : Hasil SE2016 Listing

Jika dilihat secara kuantitas, aktivitas ekonomi yang paling banyak dijalankan adalah usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yakni kategori G, berjumlah 42,17 persen dari seluruh usaha yang ada di SE2016. Kemudian, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) dan Industri Pengolahan (kategori C) merupakan aktivitas ekonomi



<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

Tantangan Pembangunan Ekonomi Kota Padang

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

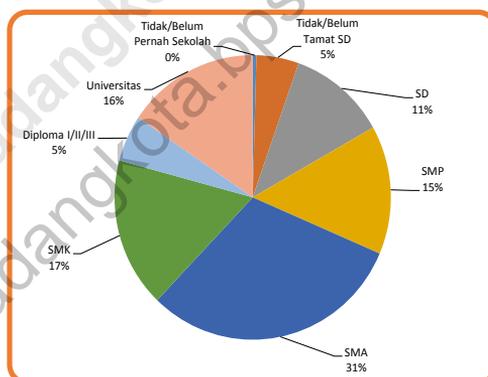
Tantangan Pembangunan Ekonomi Padang

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Rendah

Smith (2003) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja saling berkaitan dan menguatkan. Namun, untuk menciptakan ekonomi yang kuat, tenaga kerja yang berkualitas adalah syarat yang harus dipenuhi. Hasil Sakernas 2015 menunjukkan bahwa masih ada tenaga kerja di Kota Padang yang tidak pernah sekolah sebesar 0,34 persen dan tidak tamat SD sebesar 5,06 persen.

Gambar 2.1.

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan, 2015



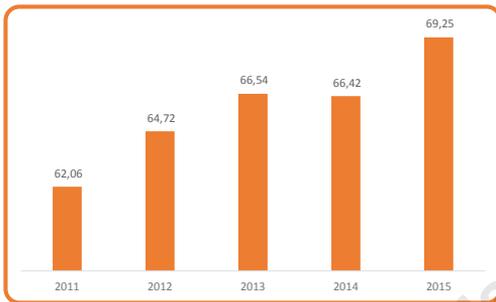
Sumber: BPS, Sakernas 2015

Tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang rendah, akan berdampak pada rendahnya daya tawar tenaga kerja Kota Padang. Hal tersebut akan menyebabkan tidak tertampungnya mereka pada lapangan pekerjaan yang lebih profesional yang mensyaratkan keahlian dan kualifikasi tinggi.

Pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Todaro, 2014). Meskipun tenaga kerja di Kota Padang masih ada tenaga kerja yang tidak tamat SD, namun berdasarkan data Sakernas 2011-2015, tenaga kerja berpendidikan SMA ke atas cukup mendominasi dan meningkat selama rentang tahun tersebut.

Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja, maka semakin tinggi pula produktivitas yang bisa dicapainya. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan SMA ke atas meningkat dari 62,06 persen pada tahun 2011 menjadi 69,25 persen pada tahun 2015.

Gambar 2.2
Persentase Tenaga Kerja Berpendidikan SMA ke atas, 2011-2015



Sumber : BPS, Sakernas 2011-2015

Secara tidak langsung, pendidikan meningkatkan produktivitas. SDM yang berpendidikan menggunakan sumberdaya lain lebih efisien sehingga menjadi lebih produktif. Dengan pendidikan pula, proses produksi menjadi lebih baik. Kesimpulannya, peningkatan pendidikan akan meningkatkan efisien seluruh faktor produksi. Hal inilah yang membedakan antara negara kaya dan negara miskin. Negara miskin tidak mampu meningkatkan produktivitas karena investasi SDM yang rendah dan tidak mampu mengadopsi teknologi yang baru. Di samping itu, hal ini terjadi karena tabungan domestik dan sumber daya keuangan eksternal yang minim (UNDP,1996).

2. Infrastruktur Ekonomi yang Terbatas

Infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara produsen dan konsumen (Pearce, 1996). Dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur merupakan elemen yang sangat dibutuhkan (Hirschman, 1958). Bank Dunia (1994) membagi infrastruktur kedalam 3 jenis yaitu infrastruktur ekonomi, sosial, dan administrasi/institusi. Infrastruktur ekonomi meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas); *public works* (bendungan, saluran irigasi, dan drainase), serta transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, dan lapangan terbang). Sementara infrastruktur sosial meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sedangkan infrastruktur administrasi/institusi seperti penegakan hukum, kontrol administrasi, dan lain sebagainya.

Ketersediaan infrastruktur yang baik di suatu daerah akan mendorong peningkatan produktivitas output maupun tenaga kerja. Peningkatan produktivitas output karena menunjang proses produksi dan distribusi yang akan berdampak pada peningkatan output. Sementara infrastruktur sosial akan meningkatkan modal manusia, sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.

bab 3



Pengembangan
Potensi Ekonomi Lokal
untuk Pemerataan
Pembangunan

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Pemerataan Pembangunan

1. Optimalisasi Sektor Potensial untuk Pemerataan Pembangunan

Ketimpangan ekonomi antarwilayah menjadi latar belakang mengapa optimalisasi potensi kewilayahan menarik untuk dianalisis. Ketersediaan akan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja dan teknologi menentukan keunggulan komparatif suatu wilayah. Potensi-potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu wilayah tersebut akan memengaruhi efisiensi dari nilai ekonomi yang dikembangkan berdasarkan potensi-potensi tersebut. Untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang berkualitas, pemerintah perlu mengoptimalkan keunggulan komparatif wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dengan demikian produk barang atau jasa yang dikembangkan akan lebih efisien sehingga mempunyai daya saing dan keunggulan kompetitif yang tinggi baik di tingkat domestik maupun regional.

Pemerataan pembangunan antar wilayah merupakan arah kebijakan utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, menggali potensi ekonomi masing-masing wilayah harus dilakukan untuk optimalisasi pembangunan berbasis potensi yang dimiliki. Upaya yang telah dilakukan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan konsep pembangunan berdimensi wilayah. Dalam RPJMD 2014-2019 sudah diarahkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi keunggulan daerah dengan memperhatikan kearifan lokal untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.

Sama untuk level nasional untuk wilayah Sumatera Barat untuk mewujudkan pembangunan yang berdimensi kewilayahan maka optimalisasi potensi kewilayahan mejadi suatu keharusan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kontribusi masing-masing kabupaten/kota terhadap PDRB Sumatera Barat sangat bervariasi. Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman memberikan kontribusi besar terhadap PDRB wilayah Sumatera Barat. Namun kabupaten/kota lain juga memiliki potensi ekonomi yang tumbuh cukup baik. Potensi ekonomi ini memperlihatkan

Tabel 3.1.
Disparitas Capaian Ekonomi Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Kontribusi PDRB (%)	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kepulauan Mentawai	1,89	5,01	42,79
2. Pesisir Selatan	5,41	5,30	23,55
3. Kabupaten Solok	5,60	5,30	30,16
4. Sijunjung	3,91	5,25	34,12
5. Tanah Datar	5,43	5,01	31,03
6. Padang Pariaman	8,88	5,50	42,88
7. Agam	8,37	5,40	34,37
8. Lima Puluh Kota	6,40	5,31	33,89
9. Pasaman	3,54	5,06	25,64
10. Solok Selatan	2,33	5,11	28,26
11. Dharmasraya	4,27	5,39	36,78
12. Pasaman Barat	6,48	5,32	30,55
13. Padang	24,98	6,21	53,88
14. Kota Solok	1,64	5,75	48,11
15. Sawahlunto	1,49	5,71	48,35
16. Padang Panjang	1,41	5,79	53,64
17. Bukittinggi	3,42	6,04	54,12
18. Payakumbuh	2,52	6,08	38,39
19. Pariaman	2,03	5,58	46,73
Sumatera Barat	100	5,26	37,21

Sumber: PDRB Per Kabupaten/Kota, 2016

pertumbuhan cukup mengembirakan. Oleh sebab itu, penggalan potensi ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat sangat penting dilakukan sebagai konsep pembangunan kewilayahan.

Untuk keperluan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan dengan optimalisasi sektor unggulan dibutuhkan data yang akan menjadi acuan bagi program-program yang tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu kegiatan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) adalah

Pendaftaran Rumah Tangga SE 2016 (SE2016-L). Hasil SE2016-L merupakan data dasar yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang struktur dan potensi kegiatan usaha di Sumatera Barat termasuk Kota Padang. Dalam menggambarkan potensi ekonomi dari hasil SE2016, dilakukan pengelompokan menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat.

2. Potensi Ekonomi Kota Padang

Dalam mengembangkan potensi ekonomi Kota Padang, telah disusun beberapa masterplan dan kebijakan. Salah satu tertuang dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019. Dalam RPJMD tersebut terdapat sepuluh prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2014-2019. Prioritas pembangunan tersebut dilandasi oleh potensi yang dimiliki oleh kawasan/wilayah di Kota Padang.

Selain berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan, potret potensi ekonomi di suatu wilayah dapat dipetakan berdasarkan data yang akurat berdasarkan potensi sumber daya. Potensi sumber daya sebagai potret potensi ekonomi di suatu wilayah harus berdasarkan pada data yang tepat dan akurat. Data hasil SE2016 mampu menakar potensi ekonomi tersebut sampai pada level Kabupaten/Kota. Data SE2016 menyediakan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan tenaga kerja seluruh sektor di luar pertanian hingga level administrasi terkecil. Oleh sebab itu, modal ini sangat penting dalam mengukur potensi dari nilai ekonomi di suatu wilayah. Ketersediaan data yang lengkap jika ditunjang oleh metodologi yang tepat akan menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Untuk mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah terdapat tiga metode yaitu:

1. *Regional Account (Income – Expenditure) Approach* yang mengukur nilai ekonomi dari suatu wilayah berdasarkan produk atau kegiatan ekonomi pada setiap sektor di suatu wilayah.

2. *Input – Output Approach*: yang mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari nilai pemanfaatan faktor produksi atau input baik yang tersedia di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain untuk menghasilkan output tertentu.

3. *Economic Base Approach* yaitu dengan mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi sehingga menghasilkan kelompok struktur perekonomian daerah menjadi sektor unggulan dan bukan unggulan.

Mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah berdasarkan data SE2016 dapat menggunakan pendekatan teori *Economic Base Approach*. Teori ini didasarkan pada perkembangan peran sektor ekonomi, baik di dalam wilayah maupun ke luar wilayah terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut. Dari metode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu sektor unggulan, sektor potensial dan bukan sektor unggulan.

Konsep dasar *economic base* terletak pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah ditentukan oleh pertumbuhan ekspor dari wilayah yang mampu mendatangkan pendapatan dari luar wilayah. Sektor-sektor yang kinerja ekspornya baik dan tumbuh pesat dikategorikan sebagai *base activities/sectors* (sektor unggulan). Sebaliknya, kategori lapangan usaha yang tidak memiliki performa ekspor yang tinggi dapat dikategorikan sebagai *non-base sectors* (sektor bukan unggulan). Analisis dari sektor unggulan dan bukan unggulan didasarkan pada nilai tambah

atau lapangan pekerjaan yang diciptakan (jumlah tenaga kerja yang terserap).

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah, beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain *Location Quotient* (LQ), Analisis *Shift-Share*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klassen. Penjelasan mengenai metode-metode tersebut dapat dilihat di catatan teknis.

3. Hasil Pengukuran Potensi Ekonomi Padang

Dengan menggunakan keempat metode dalam pengukuran potensi keunggulan sektoral yang ada di Kota Padang dengan menggunakan data SE2016-L didapatkan rekap hasil dari analisis *economic based approach* untuk Kota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Rekap Hasil Kategori Unggulan di Kota Padang, 2016

Kategori	LQ	Shift Share		MRP		Klassen	Keterangan	RPJMD
		Ps	Ds	RPip	RPin			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	-	-	+	-	-	KW IV		
C. Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	KW II		
F. Konstruksi	-	+	+	+	+	KW IV	Potensi	
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	KW III		Ya
H. Pengangkutan dan pergudangan	+	+	+	+	+	KW I	Unggulan	Ya
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	+	-	-	-	-	KW III	Potensi	Ya
J. Informasi Dan Komunikasi	+	+	-	+	+	KW II	Unggulan	
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	+	+	+	+	+	KW I	Unggulan	
L. Real Estat	+	-	+	-	-	KW I	Potensi	
M,N. Jasa Perusahaan	+	-	+	-	-	KW I	Potensi	
P. Pendidikan	-	+	+	+	+	KW I	Potensi	Ya
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	+	+	+	+	+	KW IV	Unggulan	Ya
R,S,U. Jasa lainnya	+	-	-	-	-	KW II	Potensi	

Sumber: Hasil SE2016 Listing dan PDRB 2015

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha unggulan cukup bervariasi bila dilihat dari jumlah aktivitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah yang dihasilkannya. Namun demikian, tidak semua kategori atau sektor ekonomi menjadi prioritas pembangunan di Kota Padang. Oleh sebab itu, beberapa kategori tersebut dapat dikatakan sebagai sektor potensial.

Sementara itu, dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019 pemerintah daerah telah menetapkan beberapa prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kategori lapangan usaha adalah sebagai berikut:

Prioritas 1: Percepatan Pembangunan Saranan Perdagangan Kota dan Sentra Ekonomi

Dari analisis kondisi umum daerah kota Padang menunjukkan bahwa struktur perekonomian kota Padang lebih banyak didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa. Sedangkan kegiatan industri kelihatannya masih belum begitu berkembang dengan baik sebagaimana terlihat dari kontribusi sektor industri dalam perekonomian kota. Untuk itu sasaran utama dari kebijakan pembangunan adalah meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan.

Untuk dapat mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Sumatera Bagian Barat, maka strategi utama yang diperlukan adalah: 1) Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana yang dapat mendukung kegiatan perdagangan tersebut, 2) Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha perdagangan

3) Meningkatkan efisiensi dan daya saing kegiatan perdagangan barang dan jasa, 4) Mendorongan peningkatan aktivitas perdagangan

Prioritas 2: Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan.

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Kota Padang sebagai daerah tujuan pendidikan.

Prioritas 3: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Transportasi Kota

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi dibidang energi baru dan terbarukan serta

pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman.

Prioritas 4: Pengembangan Industri Pariwisata

Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, 3) Terwujudnya Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan, 4) Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, dan 5) Meningkatkan kesejahteraan warga kota melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan di bidang pariwisata.

Prioritas 6: Peningkatan Dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih

dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi baik.

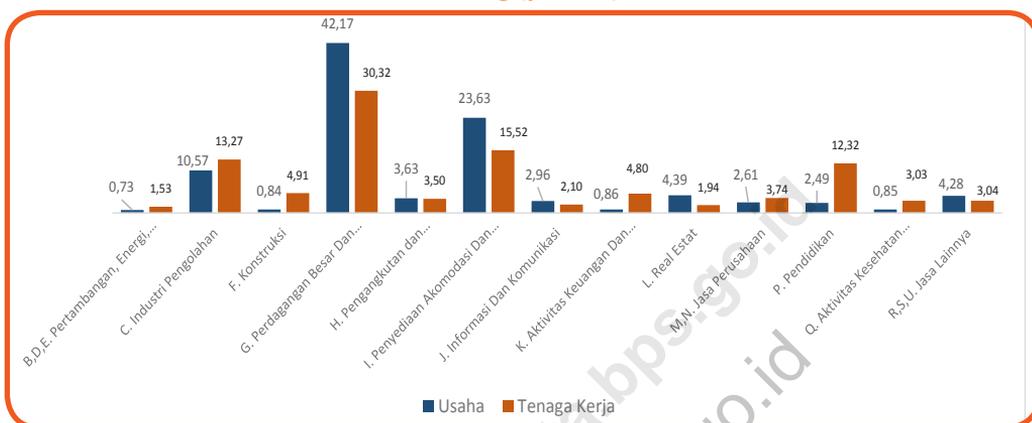
Dengan menggunakan keempat metode dalam pengukuran potensi keunggulan dan memperhatikan beberapa prioritas pembangunan dalam RPJMD dihasilkan Kategori Unggulan dan Kategori Potensi adalah sebagai berikut:

- Kategori Unggulan:
 1. Transportasi dan Perdagangan (Kategori H)
 2. Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K)
 3. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q)
 4. Informasi dan Komunikasi (J)
- Kategori Potensi dari sisi pertumbuhan:
 1. Konstruksi (F)
 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)
 3. Real Estat (Kategori L)
 4. Jasa Perusahaan (M,N)
 5. Pendidikan (P)
 6. Jasa Lainnya (R,S,TU)

Empat kategori unggulan dengan urutan teratas (Kategori H, K, Q dan J) merupakan bagian dari sektor yang perlu dikembangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2014-2019. Oleh sebab itu, pembahasan keempat kategori ini akan lebih menarik jika dibahas lebih rinci dalam bab tersendiri.

Dalam hal jumlah aktivitas ekonomi, sesungguhnya jumlah usaha Kategori F tidak terlalu banyak dan menempati urutan ketiga terbawah. Tetapi Kategori F dapat menyerap tenaga kerja cukup

Gambar 3.1.
Proporsi Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha Kota Padang (persen), 2015



Sumber: Hasil SE2016 Listing

besar dibanding kategori lainnya (Gambar 3.1). Oleh sebab itu, pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal perlu mempertimbangkan banyak hal, diantaranya aspek nilai ekonomi yang dihasilkan, penyerapan tenaga kerja, penyediaan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi, dan aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan.

Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (Kategori G) dalam analisis *economic based approach* tidak terpilih sebagai sektor unggulan. Namun, kategori ini memiliki kontribusi yang paling tinggi dalam menciptakan nilai tambah. Oleh sebab itu, analisis usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, terutama yang menjadi target pengembangan pemerintah juga sangat menarik untuk diulas.

Kategori Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah (B, D, E) dan Industri Pengolahan (C) juga termasuk kategori potensial, tetapi karena kontribusinya kecil maka tidak dibahas dalam tulisan ini.

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

bab 4



SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG:
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

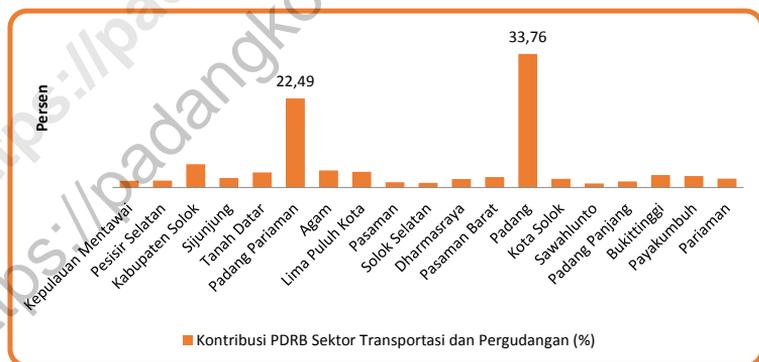
SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG: TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Transportasi dan Pergudangan

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang paling maju di Sumatera Barat dibandingkan daerah lainnya. Kota Padang memiliki keunggulan komparatif pada sektor transportasi dan pergudangan dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015, kota Padang berkontribusi dalam menciptakan PDRB transportasi dan pergudangan di Sumatera Barat sebesar 33,76 persen. Nilai ini adalah yang tertinggi diantara daerah lainnya di Sumatera Barat.

Gambar 4.1.

Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Transportasi dan Pergudangan di Sumatera Barat, 2015 (persen)



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Kontribusi terbesar berikutnya adalah kabupaten Padang Pariaman. Hal ini karena adanya bandara di kabupaten tersebut. Sekitar 83 persen PDRB transportasi dan pergudangan di kabupaten Padang Pariaman disumbangkan oleh angkutan udara. Selain karena kota Padang sebagai ibukota provinsi, keberadaan bandara yang dekat dengan kota Padang ini turut memicu sektor transportasi dan pergudangan.

Tabel 4.1.

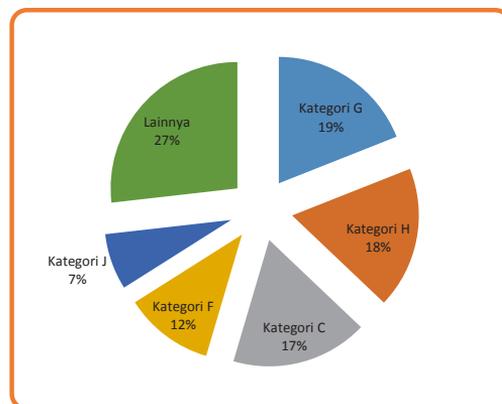
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi dan Pergudangan di Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persen (%)	Tenaga Kerja	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	62	0,24	113	0,31
2	Pesisir Selatan	1 683	6,47	1 963	5,37
3	Kabupaten Solok	2 784	10,71	3 023	8,26
4	Sijunjung	1 119	4,30	1 357	3,71
5	Tanah Datar	4 080	15,69	4 426	12,10
6	Padang Pariaman	1 673	6,43	2 241	6,13
7	Agam	2 960	11,38	3 481	9,52
8	Lima Puluh Kota	911	3,50	1 101	3,01
9	Pasaman	887	3,41	1 138	3,11
10	Solok Selatan	603	2,32	690	1,89
11	Dharmasraya	528	2,03	685	1,87
12	Pasaman Barat	926	3,56	1 162	3,18
13	Padang	3 395	13,06	9 147	25,01
14	Kota Solok	761	2,93	956	2,61
15	Sawahlunto	618	2,38	716	1,96
16	Padang Panjang	896	3,45	1 145	3,13
17	Bukittinggi	870	3,35	1 586	4,34
18	Payakumbuh	618	2,38	811	2,22
19	Pariaman	631	2,43	837	2,29
	Sumatera Barat	26 005	100,00	36 578	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

Jumlah usaha sektor transportasi dan pergudangan kota Padang menyumbang 13,06 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di Sumatera Barat. Dengan banyaknya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 9.147 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor transportasi dan pergudangan di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat. Sebanyak 25 persen tenaga kerja pada sektor ini di Sumatera Barat terdapat pada kota Padang. Jika kita melihat rasio nya, rata-rata terdapat dua hingga tiga orang tenaga kerja yang terdapat pada suatu perusahaan.

Gambar 4.2.
Kontribusi PDRB Kota Padang Menurut Kategori, 2015



Sumber: PDRB Kota Padang (diolah)

*]PDRB Tanpa Kategori A

Tabel 4.2.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kota Padang
Menurut Kategori, 2015

No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C. Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F. Konstruksi	0,84	4,91
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H. Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J. Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L. Real Estat	4,39	1,94
10	M,N. Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P. Pendidikan	2,49	12,32
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U. Jasa Lainnya	4,28	3,04
	PADANG	100,00	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut kategorinya, PDRB sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi sebesar 18,13 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang penting pada perekonomian kota Padang.

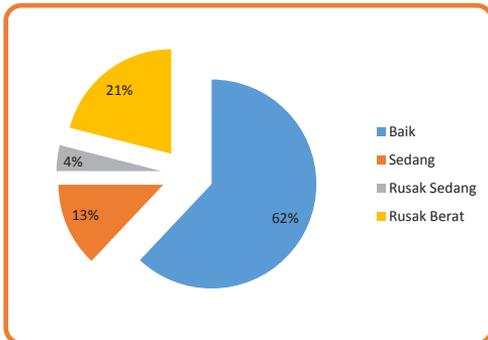
Jumlah usaha pada sektor transportasi dan pergudangan di kota Padang sebanyak 3,63 persen dari seluruh usaha yang ada di kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini pun sebesar 3,5 persen dari seluruh tenaga kerja non pertanian yang ada di kota Padang. Menarik untuk dicermati lebih lanjut karena dengan sedikitnya usaha dan tenaga kerja pada sektor ini namun dapat memberikan

nilai tambah yang memiliki kontribusi yang signifikan pada perekonomian kota Padang. Melihat fenomena ini maka sektor transportasi dan pergudangan perlu dikembangkan lebih lanjut karena turut menggerakkan roda perekonomian kota Padang.

2. Sarana Penunjang Transportasi Padang

Melihat fenomena dari sektor unggulan yang ada, tentu haruslah didukung dengan sarana penunjang yang memadai. Kondisi jalan di kota Padang mayoritas sudah dalam kondisi baik. Sebanyak 62 persen jalan di kota Padang sudah dalam

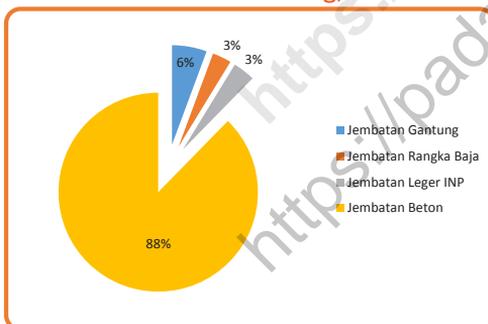
Gambar 4.3.
Persentase Panjang Jalan menurut Kondisi di Kota Padang, 2015



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang

kondisi baik. Namun hal ini masih perlu mendapatkan perhatian karena masih banyak jalan yang berstatus rusak berat. Sebanyak 21 persen kondisi jalan di kota Padang memiliki status rusak berat.

Gambar 4.4.
Persentase Jumlah Jembatan Menurut Jenis di Kota Padang, 2015



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang

Kondisi geografis kota Padang tidak hanya berupa daratan. Di kota Padang terdapat sungai, laut, dan bukit. Adanya jembatan sebagai penghubung antar wilayah sangat penting.

Data menunjukkan bahwa sebanyak 88 persen jembatan di kota Padang adalah jembatan beton. Hanya sedikit jembatan

berjenis leger INP atau bahkan jembatan gantung. Hal ini menunjukkan bahwa akses antar daerah sudah mudah sehingga transportasi akan berjalan dengan baik.

Gambar 4.5.
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Padang, 2015



Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kendaraan di kota Padang didominasi oleh sepeda motor. Jumlah kendaraan bermotor di kota Padang selalu meningkat signifikan setiap tahunnya. Secara total peningkatan jumlah kendaraan pada tahun 2015 meningkat sekitar 23 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini turut mendukung sektor transportasi dan pergudangan menjadi unggulan. Ditambah dengan maraknya angkutan transportasi umum berbasis online turut menyumbang sektor ini.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode *shift share* dan *Klassen* juga disimpulkan bahwa sektor ini adalah sektor unggulan dan memiliki pertumbuhan yang pesat. Begitu juga dengan hasil perhitungan menggunakan metode MRP. Sektor ini memiliki potensi baik di dalam lingkup kota Padang maupun wilayah Sumatera Barat.

Sektor transportasi dan pergudangan merupakan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hal ini juga sejalan dengan hasil pendataan SE2016. Peran serta pemerintah dalam menata kebijakan dan pembangunan pada sektor ini akan memberikan dampak yang besar pada pembangunan dan kemajuan kota Padang.

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

bab 5



SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG:
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

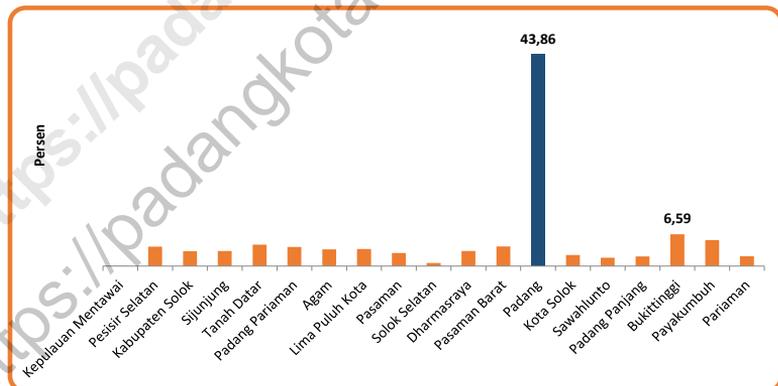
SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG: JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

1. Keunggulan Komparatif Padang di Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang paling maju di Sumatera Barat dibandingkan daerah lainnya. Kota Padang memiliki keunggulan komparatif pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015, kota Padang berkontribusi dalam menciptakan PDRB jasa keuangan dan asuransi di Sumatera Barat sebesar 43,86 persen. Nilai ini adalah yang tertinggi diantara daerah lainnya di Sumatera Barat.

Gambar 5.1.

Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi di Sumatera Barat, 2015 (persen)



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Kontribusi terbesar berikutnya adalah kota Bukittinggi. Kota ini adalah kota termaju ke-dua di Sumatera Barat. Keberadaan kota Bukittinggi sebagai daerah wisata ini turut memicu sektor jasa keuangan dan asuransinya. Jumlah usaha sektor Jasa Keuangan dan Asuransi kota Padang menyumbang 19,38 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di Sumatera Barat. Dengan banyaknya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 12.537 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor Jasa

Tabel 5.1.

Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

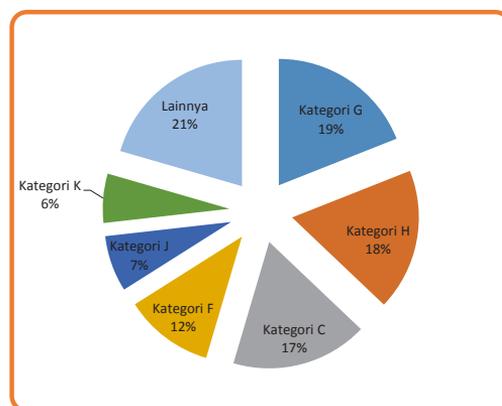
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persen (%)	Tenaga Kerja	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	22	0,53	143	0,37
2	Pesisir Selatan	211	5,05	1.749	4,48
3	Kabupaten Solok	270	6,46	1.428	3,66
4	Sijunjung	192	4,59	1.325	3,40
5	Tanah Datar	369	8,83	2.838	7,27
6	Padang Pariaman	198	4,74	951	2,44
7	Agam	450	10,77	2.419	6,20
8	Lima Puluh Kota	221	5,29	1.420	3,64
9	Pasaman	113	2,70	1.305	3,34
10	Solok Selatan	83	1,99	524	1,34
11	Dharmasraya	184	4,40	1.636	4,19
12	Pasaman Barat	185	4,43	1.779	4,56
13	Padang	810	19,38	12.537	32,13
14	Kota Solok	107	2,56	1.342	3,44
15	Sawahlunto	120	2,87	694	1,78
16	Padang Panjang	135	3,23	914	2,34
17	Bukittinggi	198	4,74	2.466	6,32
18	Payakumbuh	198	4,74	2.579	6,61
19	Pariaman	113	2,70	970	2,49
	Sumatera Barat	4.179	100,00	39.019	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

Keuangan dan Asuransi di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat. Sebanyak 32,13 persen tenaga kerja pada sektor ini di Sumatera Barat terdapat pada kota Padang. Jika kita melihat rasio nya, rata-rata terdapat 15 hingga 16 orang tenaga kerja yang terdapat pada suatu perusahaan.

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut kategorinya, PDRB sektor jasa keuangan dan asuransi berkontribusi sebesar 6 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini belum terlalu besar kontribusinya pada perekonomian kota Padang.

Gambar 5.2.
Kontribusi PDRB Padang Menurut Kategori, 2015



Sumber: PDRB Kota Padang (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Tabel 5.2.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kota Padang
Menurut Kategori, 2015

No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha (%)	Jumlah Tenaga Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E, Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C, Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F, Konstruksi	0,84	4,91
4	G, Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H, Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I, Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J, Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K, Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L, Real Estat	4,39	1,94
10	M,N, Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P, Pendidikan	2,49	12,32
12	Q, Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U, Jasa Lainnya	4,28	3,04
PADANG		100,00	100,00

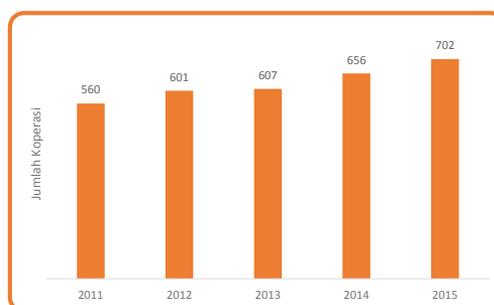
Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

Proporsi jumlah usaha pada sektor jasa asuransi dan keuangan di kota Padang sebanyak 0,86 persen dari seluruh usaha yang ada di kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini pun sebesar 4,80 persen dari seluruh tenaga kerja non pertanian yang ada di kota Padang.

2. Sarana Penunjang Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Padang

Koperasi merupakan salah satu sarana penunjang jasa keuangan. Jumlah koperasi di kota Padang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya koperasi

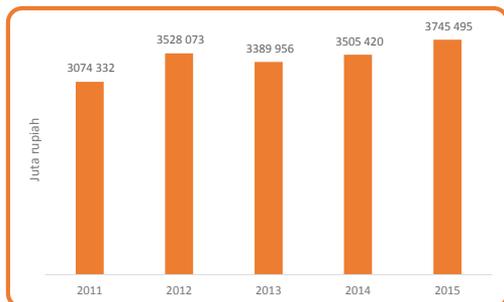
Gambar 5.3.
Jumlah Koperasi di Kota Padang 2011-2015



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

turut berkontribusi dalam penggerak perekonomian di sektor ini.

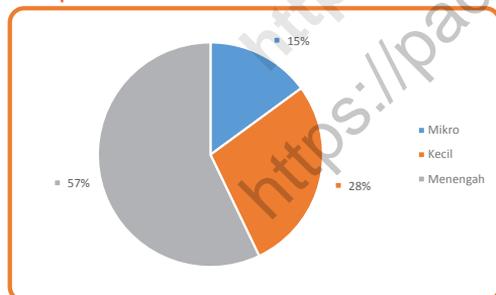
Gambar 5.4.
Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah
pada Bank Umum 2011-2015



Sumber : Kantor Wilayah IX Bank Indonesia
Cabang Padang

Dari sektor perbankan, kredit usaha yang disalurkan oleh bank umum juga mengalami peningkatan dari 2011 hingga 2015. Hal ini menunjukkan bahwa selain sektor jasa keuangan mengalami peningkatan, sektor lain juga tentu mengalami pergerakan dilihat dari kredit usaha yang telah disalurkan.

Gambar 5.5.
Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah
pada Bank Umum Dan BPR 2015



Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Barat

Kredit usaha yang disalurkan oleh bank umum dan BPR sebagian besar disalurkan kepada perusahaan level menengah. Sebanyak 57 persen dari total kredit yang disalurkan diterima oleh perusahaan level ini. Usaha mikro dan kecil juga memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu masing-

masing 15 persen dan 28 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM di kota Padang sudah banyak yang berada pada level menengah.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode *shift share* dan Klassen juga disimpulkan bahwa sektor ini adalah sektor unggulan dan memiliki pertumbuhan yang pesat. Begitu juga dengan hasil perhitungan menggunakan metode MRP. Sektor ini memiliki potensi baik di dalam lingkup kota Padang maupun wilayah Sumatera Barat.

Namun, sektor jasa keuangan dan asuransi bukan merupakan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hal ini berbeda dengan hasil pendataan SE2016. Peran serta pemerintah dalam pengembangan sektor ini diperlukan. Hal ini karena sektor ini adalah sektor potensial bagi penyediaan lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja. Dengan dikembangkannya sektor ini turut berkontribusi dalam penyelesaian masalah pengangguran.



SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG:
AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN
AKTIVITAS SOSIAL

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

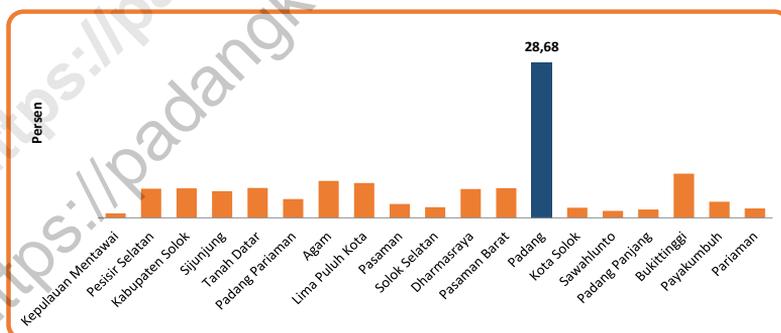
SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG: AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL

1. Keunggulan Komparatif Padang di Sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang paling maju di Sumatera Barat dibandingkan daerah lainnya. Kota Padang memiliki keunggulan komparatif pada sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015, kota Padang berkontribusi dalam menciptakan PDRB sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial di Sumatera Barat sebesar 28,68 persen. Nilai ini adalah yang tertinggi diantara daerah lainnya di Sumatera Barat.

Gambar 6.1.

Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Jumlah usaha sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial kota Padang menyumbang 10,38 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di Sumatera Barat. Dengan banyaknya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 7.908 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat. Sebanyak 21,78 persen tenaga kerja pada sektor ini di Sumatera Barat terdapat pada kota Padang. Jika kita melihat rasio nya, rata-rata terdapat 9 hingga 10 orang

Tabel 6.1.
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial di Sumatera Barat menurut
Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persen (%)	Tenaga Kerja	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	136	1,77	1 027	2,83
2	Pesisir Selatan	703	9,15	1 999	5,51
3	Kabupaten Solok	494	6,43	1 370	3,77
4	Sijunjung	349	4,54	1 389	3,83
5	Tanah Datar	794	10,34	1 780	4,90
6	Padang Pariaman	569	7,41	1 956	5,39
7	Agam	563	7,33	2 158	5,94
8	Lima Puluh Kota	580	7,55	1 630	4,49
9	Pasaman	420	5,47	1 353	3,73
10	Solok Selatan	228	2,97	1 411	3,89
11	Dharmasraya	434	5,65	1 907	5,25
12	Pasaman Barat	619	8,06	2 025	5,58
13	Padang	797	10,38	7 908	21,78
14	Kota Solok	136	1,77	1 290	3,55
15	Sawahlunto	117	1,52	738	2,03
16	Padang Panjang	99	1,29	818	2,25
17	Bukittinggi	227	2,96	2 811	7,74
18	Payakumbuh	256	3,33	1 417	3,90
19	Pariaman	160	2,08	1 317	3,63
	Sumatera Barat	7 681	100,00	36 304	100,00

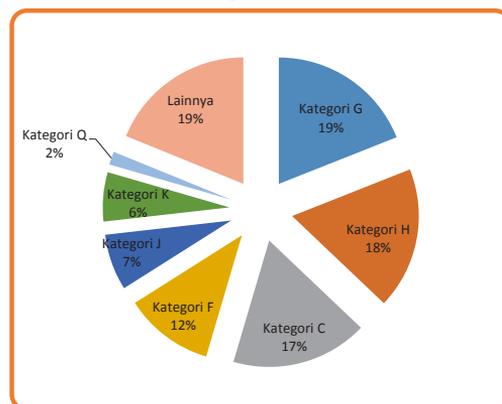
Sumber: Hasil Listin SE2016 (diolah)

tenaga kerja yang terdapat pada suatu perusahaan.

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut kategorinya, PDRB sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial berkontribusi sebesar 2 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini belum terlalu besar kontribusinya pada perekonomian kota Padang.

Proporsi jumlah usaha pada Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial di kota Padang sebanyak 0,85 persen dari seluruh usaha yang ada di kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini pun sebesar 3,03 persen dari seluruh

Gambar 6.2.
Kontribusi PDRB Padang Menurut
Kategori, 2015



Sumber: PDRB Kota Padang (diolah)
*)PDRB Tanpa Kategori A

tenaga kerja non pertanian yang ada di kota Padang.

Tabel 6.2.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kota Padang
Menurut Kategori, 2015

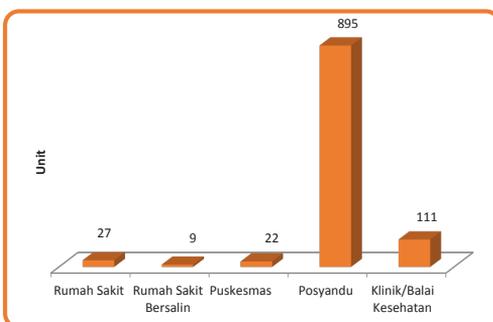
No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha (%)	Jumlah Tenaga Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C. Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F. Konstruksi	0,84	4,91
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H. Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J. Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L. Real Estat	4,39	1,94
10	M,N. Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P. Pendidikan	2,49	12,32
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U. Jasa Lainnya	4,28	3,04
PADANG		100,00	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

2. Sarana Penunjang Aktivitas Kesehatan dan Sosial di Padang

Fasilitas kesehatan terbanyak di kota Padang adalah Posyandu. Hal ini penting

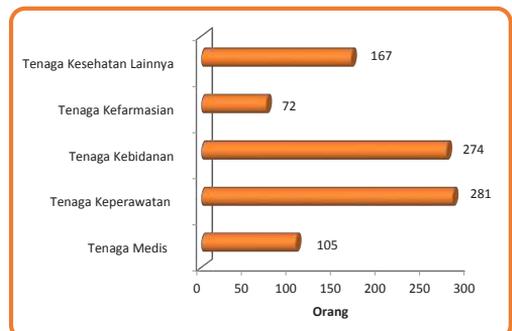
Gambar 6.3.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Padang, 2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang

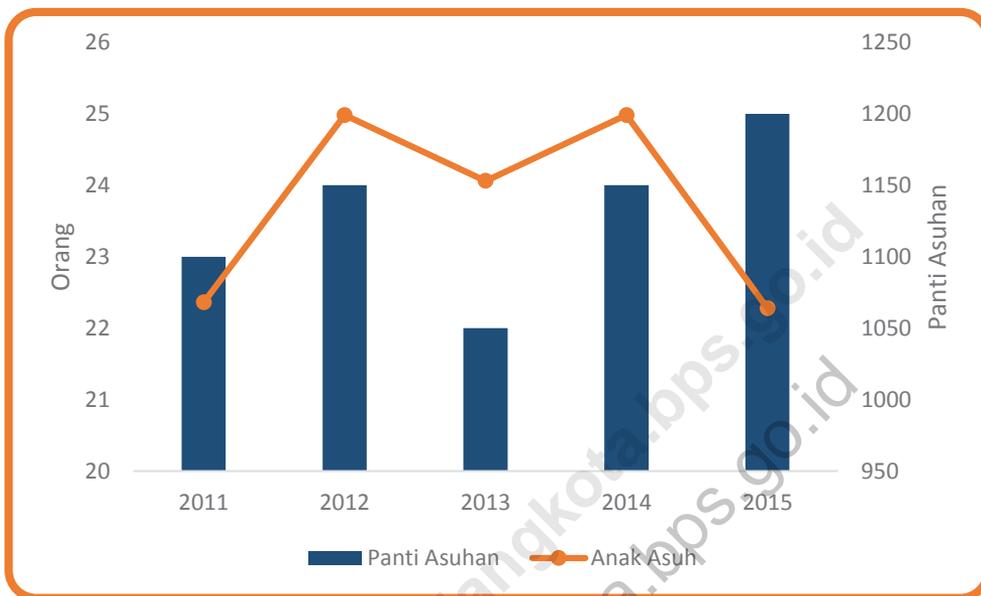
mengingat posyandu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat oleh masyarakat. Jumlah posyandu yang ada pada tahun 2015 secara rata-rata adalah 8 hingga 9 posyandu per kelurahan.

Gambar 6.4.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Padang, 2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang

Gambar 6.5.
Banyaknya Panti Asuhan dan Anak Asuh di Kota Padang, 2011-2015



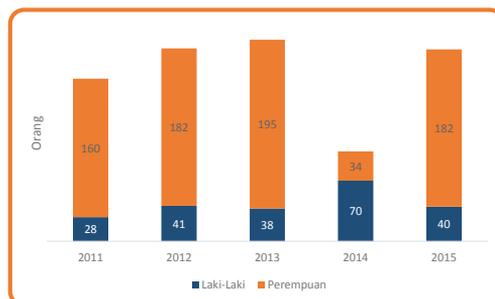
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang

Tenaga kesehatan di kota Padang terbanyak adalah tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan. Total seluruh tenaga kesehatan di kota Padang adalah 899 orang. Hal ini dirasa masih kurang cukup karena masih tidak sebanding dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang ada di kota Padang.

Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah panti asuhan di kota Padang meningkat dari 23 panti asuhan pada tahun 2011 menjadi 25 panti asuhan pada tahun 2015. Jumlah anak asuh yang ada di panti berfluktuasi dari tahun 2011 hingga 2015. Jika dilihat dari proporsi panti asuhan per anak asuh, jumlah anak asuh yang ditampung di panti asuhan pada tahun 2015 sebanyak 42 hingga 43 orang per panti asuhan. Secara kapasitas jumlah ini menurun dari tahun 2011 yaitu sebanyak

46 hingga 47 orang per panti asuhan.

Gambar 6.6.
Jumlah Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Padang, 2015



Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang

Jika dilihat dari perkembangan jumlah petugas sosial masyarakat (PSM) berdasarkan jenis kelamin per tahunnya, jumlah PSM di kota Padang meningkat dari 188 orang pada tahun 2011 menjadi

222 orang pada tahun 2015. Menarik untuk dilihat lebih lanjut karena PSM di kota Padang di dominasi oleh kaum perempuan. Jika di rasiokan, pada tahun 2015 satu orang PSM dapat menangani empat orang hingga lima orang anak asuh.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode *shift share* juga disimpulkan bahwa sektor ini adalah sektor unggulan dan memiliki pertumbuhan yang pesat. Begitu juga dengan hasil perhitungan menggunakan metode MRP. Sektor ini memiliki potensi baik di dalam lingkup kota Padang maupun wilayah Sumatera Barat. Namun jika dilihat menggunakan metode klasen disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor potensial dan masih dapat dikembangkan.

Sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial merupakan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hal ini juga sejalan dengan hasil pendataan SE2016. Peran serta pemerintah dalam menata kebijakan dan pembangunan pada sektor ini akan memberikan dampak pada pembangunan dan kemajuan kota Padang.

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

bab
7



SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG:
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN
MAKAN MINUM

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

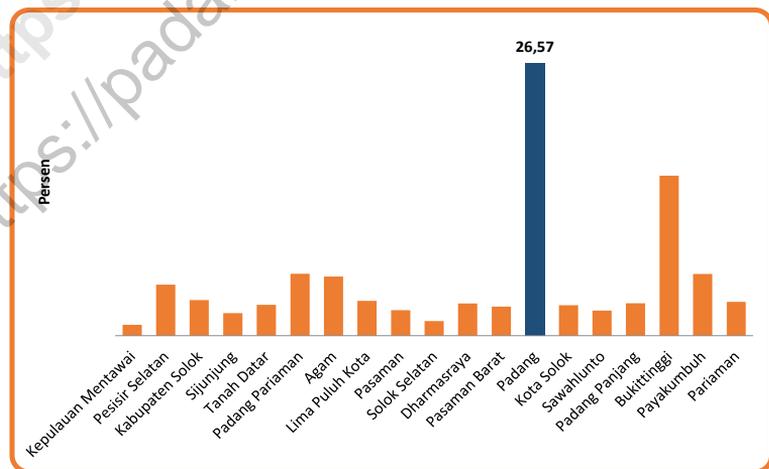
SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG: PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM

1. Keunggulan Komparatif Padang di Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang paling maju di Sumatera Barat dibandingkan daerah lainnya. Kota Padang memiliki keunggulan komparatif pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015, kota Padang berkontribusi dalam menciptakan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di Sumatera Barat sebesar 26,57 persen. Nilai ini adalah yang tertinggi diantara daerah lainnya di Sumatera Barat.

Gambar 7.1.

Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di Sumatera Barat, 2015 (persen)



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Tabel 7.1.
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

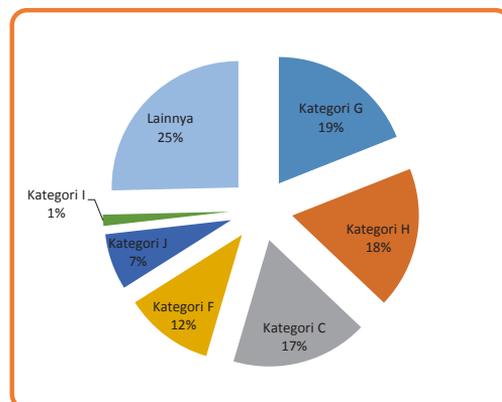
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persen (%)	Tenaga Kerja	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	594	0,52	1 197	0,65
2	Pesisir Selatan	8 152	7,11	12 925	7,06
3	Kabupaten Solok	5 295	4,62	8 103	4,43
4	Sijunjung	4 967	4,33	7 068	3,86
5	Tanah Datar	7 505	6,55	11 404	6,23
6	Padang Pariaman	11 434	9,98	17 536	9,58
7	Agam	9 630	8,40	13 932	7,61
8	Lima Puluh Kota	8 931	7,79	12 758	6,97
9	Pasaman	4 731	4,13	7 073	3,86
10	Solok Selatan	2 094	1,83	3 146	1,72
11	Dharmasraya	4 557	3,98	7 035	3,84
12	Pasaman Barat	8 630	7,53	12 606	6,89
13	Padang	22 127	19,30	40 518	22,14
14	Kota Solok	1 921	1,68	3 100	1,69
15	Sawahlunto	1 410	1,23	2 295	1,25
16	Padang Panjang	1 586	1,38	2 937	1,60
17	Bukittinggi	3 935	3,43	7 714	4,21
18	Payakumbuh	4 035	3,52	6 380	3,49
19	Pariaman	3 086	2,69	5 317	2,90
Sumatera Barat		114 620	100,00	183 044	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

Jumlah usaha sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum kota Padang menyumbang 19,30 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di Sumatera Barat. Dengan banyaknya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 40.518 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat.

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut kategorinya, PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan

Gambar 7.2.
Kontribusi PDRB Padang Menurut Kategori, 2015



Sumber: PDRB Kota Padang (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Tabel 7.2.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kota Padang
Menurut Kategori, 2015

No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha (%)	Jumlah Tenaga Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C. Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F. Konstruksi	0,84	4,91
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H. Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J. Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L. Real Estat	4,39	1,94
10	M,N. Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P. Pendidikan	2,49	12,32
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U. Jasa Lainnya	4,28	3,04
PADANG		100,00	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

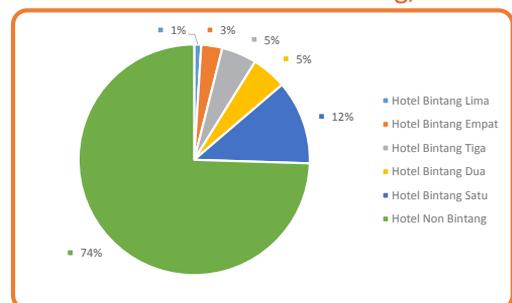
Minum berkontribusi sebesar 1 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini belum terlalu besar kontribusinya pada perekonomian kota Padang.

Proporsi jumlah usaha pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Padang sebanyak 23,63 persen dari seluruh usaha yang ada di Kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini pun sebesar 15,52 persen dari seluruh tenaga kerja non pertanian yang ada di Kota Padang. Menarik untuk dikaji lebih lanjut karena dengan banyaknya usaha dan tenaga kerja yang ada justru nilai tambah yang disumbangkan oleh sektor ini pada perekonomian masih kecil.

2. Sarana Penunjang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di Kota Padang

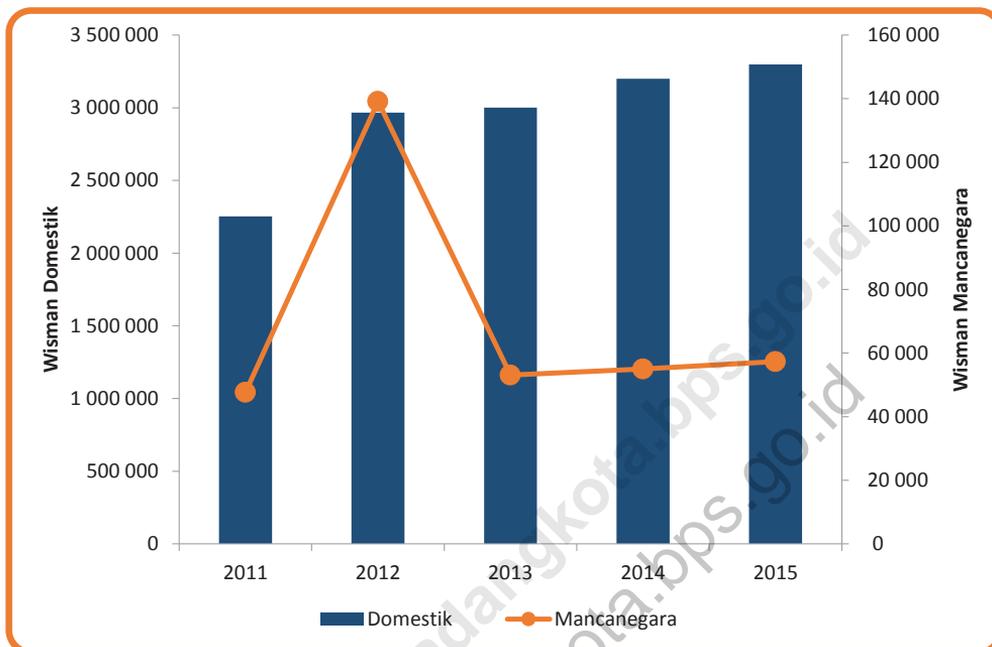
Hotel yang terbanyak berdasarkan klasifikasi di kota Padang pada tahun 2015

Gambar 7.3.
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi Hotel di Kota Padang, 2015



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang

Gambar 7.4.
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Padang, 2011–2015



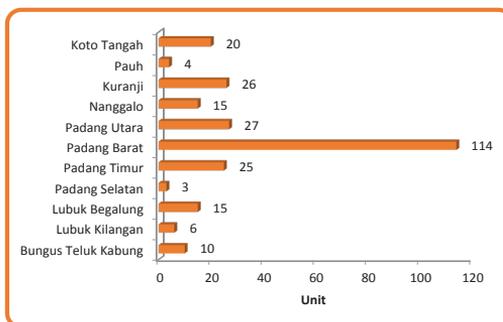
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang

adalah jenis hotel non bintang. Sebanyak 74 persen dari semua hotel di kota Padang adalah hotel dengan klasifikasi ini. Penyediaan akomodasi ini menjadi hal yang penting mengingat kota Padang sedang gencar menggerakkan sektor pariwisatanya.

Secara total, jumlah wisatawan yang berkunjung di kota Padang meningkat setiap tahunnya. Wisatawan domestik adalah yang terbanyak berkunjung ke kota Padang. Sebanyak 98 persen wisatawan yang berkunjung ke kota Padang adalah wisatawan domestik.

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, restoran/rumah makan di kota Padang pada tahun 2015 terbanyak adalah di kecamatan Padang Barat. Hal ini terkait kantor dan perusahaan terpusat pada

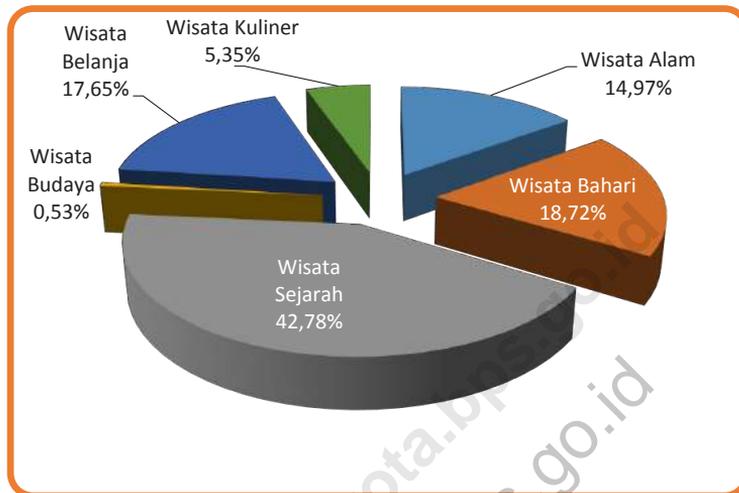
Gambar 7.5.
Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kota Padang, 2015



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang

kecamatan ini sehingga menarik minat bagi pengusaha kuliner untuk mencari peluang usaha di daerah ini. Selain itu, kecamatan ini ditunjang dengan banyaknya jumlah dan jenis objek wisata. Sebanyak 44 persen wisata yang ada di

Gambar 7.6.
Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis di Kota Padang, 2015



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang

kota Padang berada pada kecamatan ini.

Jenis wisata terbanyak yang ada di kota Padang pada tahun 2015 adalah wisata sejarah sebanyak 42,78 persen. Jenis wisata terbanyak berikutnya adalah wisata bahari, belanja dan alam. Masing-masing berkontribusi sebanyak 18,72 persen, 17,65 persen, dan 14,97 persen. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode *shift share* disimpulkan bahwa sektor ini memiliki daya saing yang rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Sumatera Barat, dan peranan terhadap Sumatera Barat juga rendah jika dilihat per kategorinya di kota Padang. Begitu juga dengan hasil

perhitungan menggunakan metode MRP. Sektor ini tidak memiliki potensi baik di dalam lingkup kota Padang maupun wilayah Sumatera Barat. Jika dilihat menggunakan metode klasen disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor potensial dan tertinggal.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum merupakan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hasil pendataan SE2016 memberikan informasi bahwa sektor ini masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lain. Peran serta pemerintah dalam menata kebijakan dan pembangunan pada sektor ini akan memberikan dampak pada pengentasan pengangguran di kota Padang.

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

bab 8



SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG:
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

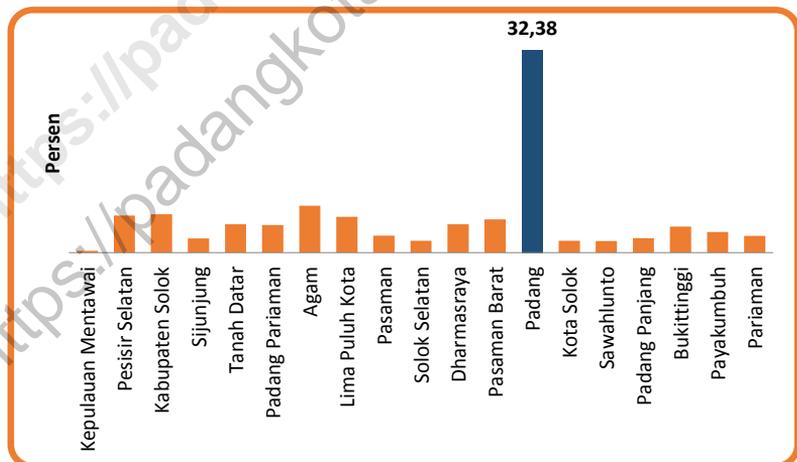
SEKTOR UNGGULAN KOTA PADANG: INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Keunggulan Komparatif Padang di Sektor Informasi dan Komunikasi

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang paling maju di Sumatera Barat dibandingkan daerah lainnya. Kota Padang memiliki keunggulan komparatif pada sektor Informasi dan Komunikasi dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015, kota Padang berkontribusi dalam menciptakan PDRB sektor Informasi dan Komunikasi di Sumatera Barat sebesar 32,38 persen. Nilai ini adalah yang tertinggi diantara daerah lainnya di Sumatera Barat.

Gambar 8.1.

Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Informasi dan Komunikasi di Sumatera Barat, 2015 (persen)



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Jumlah usaha sektor Informasi dan Komunikasi kota Padang menyumbang 20,12 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di Sumatera Barat. Dengan dominannya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 5.475 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor Informasi dan Komunikasi di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat. Sebanyak 27,01 persen tenaga kerja pada sektor ini di Sumatera

Tabel 8.1.

Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Informasi dan Komunikasi di Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persen (%)	Tenaga Kerja	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	67	0,49	118	0,58
2	Pesisir Selatan	925	6,72	1 282	6,32
3	Kabupaten Solok	818	5,94	1 030	5,08
4	Sijunjung	529	3,84	676	3,33
5	Tanah Datar	1 403	10,19	1 719	8,48
6	Padang Pariaman	1 017	7,39	1 308	6,45
7	Agam	1 273	9,25	1 624	8,01
8	Lima Puluh Kota	782	5,68	1 009	4,98
9	Pasaman	470	3,42	597	2,95
10	Solok Selatan	289	2,10	371	1,83
11	Dharmasraya	554	4,03	820	4,05
12	Pasaman Barat	865	6,29	1 189	5,87
13	Padang	2 769	20,12	5 475	27,01
14	Kota Solok	210	1,53	352	1,74
15	Sawahlunto	182	1,32	244	1,20
16	Padang Panjang	286	2,08	415	2,05
17	Bukittinggi	563	4,09	903	4,45
18	Payakumbuh	434	3,15	644	3,18
19	Pariaman	326	2,37	495	2,44
	Sumatera Barat	13 762	100,00	20 271	100,00

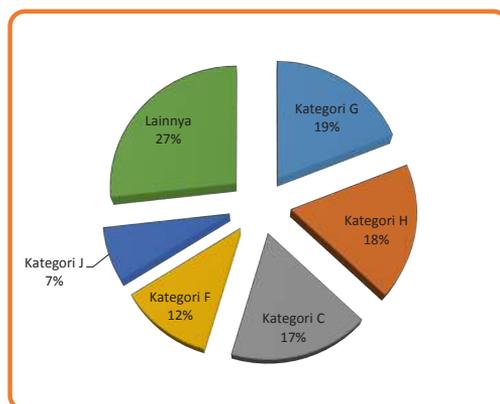
Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

Barat terdapat pada kota Padang. Jika kita melihat rasio nya, rata-rata terdapat 1 hingga 2 orang tenaga kerja yang terdapat pada suatu perusahaan.

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut kategorinya, PDRB sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 7 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini belum terlalu besar kontribusinya pada perekonomian kota Padang.

Proporsi jumlah usaha pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di kota Padang sebanyak 2,96 persen dari seluruh usaha yang

Gambar 8.2.
Kontribusi PDRB Kota Padang Menurut Kategori, 2015



Sumber: PDRB Kota Padang Tanpa Kategori A

ada di kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini pun sebesar

Tabel 8.2.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Padang
Menurut Kategori, 2015

No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha (%)	Jumlah Tenaga Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C. Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F. Konstruksi	0,84	4,91
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H. Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J. Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L. Real Estat	4,39	1,94
10	M,N. Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P. Pendidikan	2,49	12,32
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U. Jasa Lainnya	4,28	3,04
PADANG		100,00	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

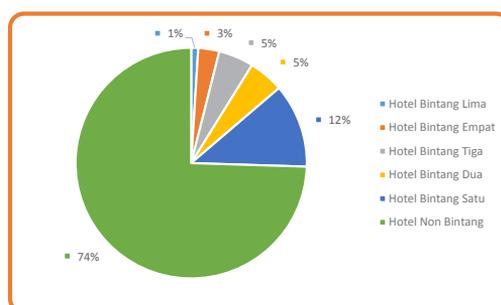
2,10 persen dari seluruh tenaga kerja non pertanian yang ada di kota Padang.

2. Sarana Penunjang Sektor Informasi dan Komunikasi di Kota Padang

Media komunikasi/informasi yang terbanyak di kota Padang pada tahun 2015 adalah kesenian tradisional. Sebanyak 35 persen dari semua media komunikasi/informasi di kota Padang diisi oleh media ini. Kemudian jumlah yang terbanyak selanjutnya adalah KEMPIK/kelompok masyarakat sebanyak 26 persen, dan media cetak sebanyak 16 persen.

Secara total, jumlah pelanggan telkom di kota Padang sebanyak 64.667 pelanggan.

Gambar 8.3.
Jumlah Media Komunikasi/Informasi dan Pembinaan di Kota Padang, 2015

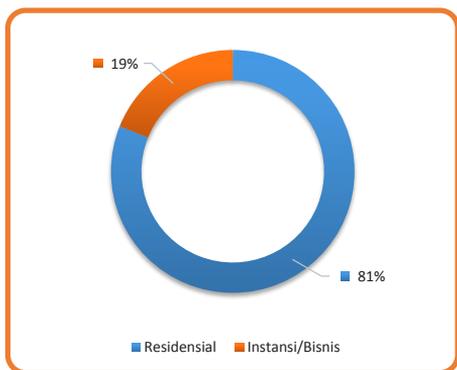


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang

Sebanyak 81 persen pelanggan Telkom kota Padang adalah pelanggan residensial dan 19 persen adalah instansi/bisnis.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggulan

Gambar 8.4.
Jumlah Pelanggan Telkom
menurut Sentral dan Jenis, 2015



Sumber : PT TELKOM Padang

dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode shift share disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor dengan pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi. Begitu juga dengan hasil perhitungan menggunakan metode MRP. Sektor ini memiliki potensi jika dilihat pada level wilayah di Sumatera Barat. Jika dilihat menggunakan metode klasen disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan.

Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hasil pendataan SE2016 memberikan informasi bahwa sektor ini masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lain. Peran serta pemerintah dalam menata kebijakan dan pembangunan pada sektor ini akan memberikan dampak pada pengentasan pengangguran di kota Padang.

bab 9



<https://padangkota.bps.go.id>

SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG:
REAL ESTATE

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

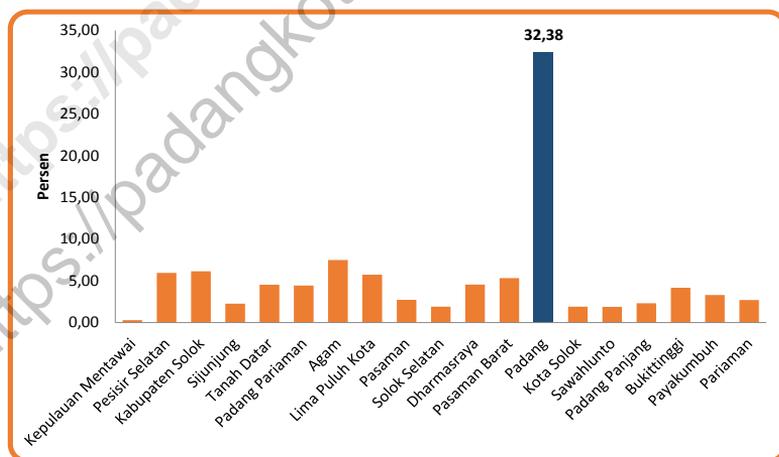
SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG: REAL ESTATE

1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Real Estate

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang paling maju di Sumatera Barat dibandingkan daerah lainnya. Kota Padang memiliki keunggulan komparatif pada sektor Real Estate dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015, kota Padang berkontribusi dalam menciptakan PDRB sektor Real Estate di Sumatera Barat sebesar 32,38 persen. Nilai ini adalah yang tertinggi diantara daerah lainnya di Sumatera Barat.

Gambar 9.1.

Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Real Estate di Sumatera Barat, 2015 (persen)



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Jumlah usaha sektor Real Estate kota Padang menyumbang 33,27 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di Sumatera Barat. Dengan dominannya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 5.058 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor Real Estate di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat. Sebanyak 35,18 persen tenaga kerja pada sektor ini di Sumatera Barat terdapat pada kota Padang. Jika

Tabel 9.1.
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor
Real Estate Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persen (%)	Tenaga Kerja	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	140	1,13	163	1,13
2	Pesisir Selatan	342	2,77	406	2,82
3	Kabupaten Solok	461	3,73	494	3,44
4	Sijunjung	383	3,10	430	2,99
5	Tanah Datar	530	4,29	561	3,90
6	Padang Pariaman	401	3,25	435	3,03
7	Agam	522	4,23	562	3,91
8	Lima Puluh Kota	321	2,60	351	2,44
9	Pasaman	410	3,32	441	3,07
10	Solok Selatan	333	2,70	413	2,87
11	Dharmasraya	603	4,88	725	5,04
12	Pasaman Barat	566	4,58	617	4,29
13	Padang	4 111	33,27	5 058	35,18
14	Kota Solok	433	3,50	455	3,16
15	Sawahlunto	236	1,91	256	1,78
16	Padang Panjang	512	4,14	574	3,99
17	Bukittinggi	1 013	8,20	1 207	8,40
18	Payakumbuh	759	6,14	901	6,27
19	Pariaman	279	2,26	328	2,28
Sumatera Barat		12 355	100,00	14 377	100,00

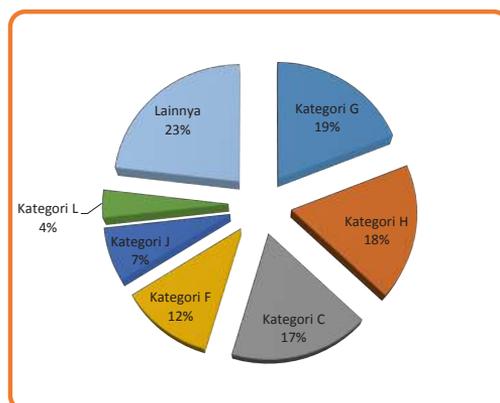
Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

kita melihat rasio nya, rata-rata terdapat 1 hingga 2 orang tenaga kerja yang terdapat pada suatu perusahaan.

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut kategorinya, PDRB sektor Real Estate berkontribusi sebesar 4 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini belum terlalu besar kontribusinya pada perekonomian kota Padang.

Proporsi jumlah usaha pada sektor Real Estate di kota Padang sebanyak 4,39 persen dari seluruh usaha yang ada di kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini pun sebesar 1,94 persen dari seluruh tenaga kerja non pertanian yang ada di kota Padang.

Gambar 9.2.
Kontribusi PDRB Padang Menurut
Kategori, 2015



Sumber: PDRB Kota Padang (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

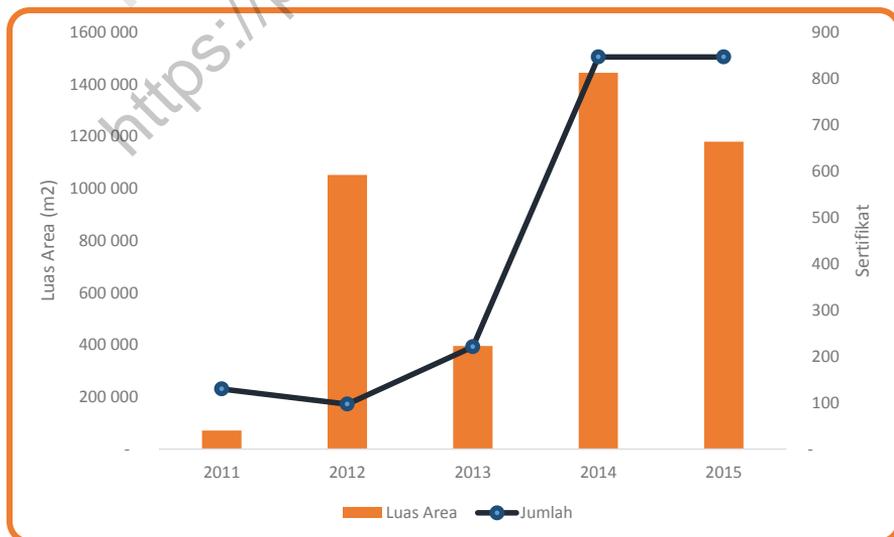
Tabel 9.2.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Padang
Menurut Kategori, 2015

No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha (%)	Jumlah Tenaga Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C. Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F. Konstruksi	0,84	4,91
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H. Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J. Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L. Real Estat	4,39	1,94
10	M,N. Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P. Pendidikan	2,49	12,32
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U. Jasa Lainnya	4,28	3,04
PADANG		100,00	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

2. Sarana Penunjang Sektor Real Estate di Kota Padang

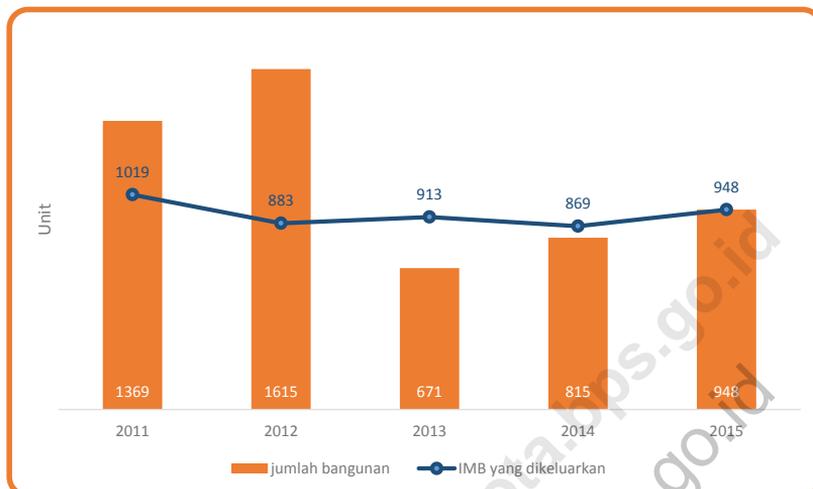
Gambar 9.3.
Jumlah dan Luas Tanah Negara yang Sudah disertifikatkan 2011-2015



Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Padang

Gambar 9.4.

Perkembangan Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Padang, 2011-2015



Sumber: Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang

Jumlah luas tanah negara yang sudah disertifikatkan meningkat dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 (Gambar 9.3), namun luas tanah yang disertifikatkan berfluktuasi tiap tahunnya. Hal ini merupakan salah satu faktor dalam pembentukan sektor di real estate di kota Padang.

Gambar 9.4 memperlihatkan bahwa jumlah IMB yang dikeluarkan setiap tahunnya menurun sedikit demi sedikit pada periode 2011 hingga 2015. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah bangunan yang dibangun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pada bangunan di kota Padang masih belum pesat.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode *shift share* disimpulkan bahwa sektor ini merupakan

sektor dengan pertumbuhan terhambat tetapi berkembang. Begitu juga dengan hasil perhitungan menggunakan metode MRP. Sektor ini tidak berpotensi baik di tingkat regional kota Padang maupun wilayah Sumatera Barat. Jika dilihat menggunakan metode klasen disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan dan tumbuh pesat jika dibandingkan dengan wilayah Sumatera Barat.

Sektor Real Estate tidak termasuk prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hasil pendataan SE2016 memberikan informasi bahwa sektor ini masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lain. Peran serta pemerintah dalam menata kebijakan dan pembangunan pada sektor ini akan memberikan dampak pada pengentasan pengangguran di kota Padang.

bab 10



<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG: JASA PERUSAHAAN

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

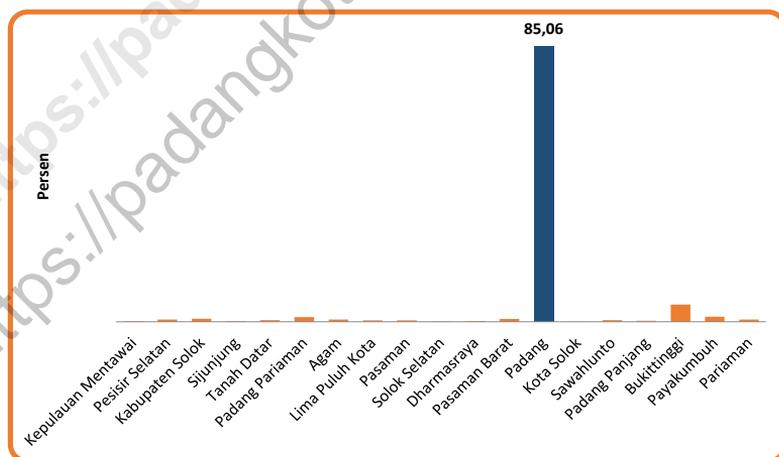
SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG: JASA PERUSAHAAN

1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Jasa Perusahaan

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang paling maju di Sumatera Barat dibandingkan daerah lainnya. Kota Padang memiliki keunggulan komparatif pada sektor Jasa Perusahaan dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015, kota Padang berkontribusi dalam menciptakan PDRB sektor Jasa Perusahaan di Sumatera Barat sebesar 85,06 persen. Nilai ini adalah yang tertinggi diantara daerah lainnya di Sumatera Barat.

Gambar 10.1.

Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Jasa Perusahaan di Sumatera Barat, 2015 (persen)



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Jumlah usaha sektor Jasa Perusahaan kota Padang menyumbang 25,99 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di Sumatera Barat. Dengan dominannya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 9.774 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor Jasa Perusahaan di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat. Sebanyak 38,22 persen tenaga kerja pada sektor ini di Sumatera Barat terdapat pada Kota

Tabel 10.1.

Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Jasa Perusahaan Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persen (%)	Tenaga Kerja	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	29	0,31	60	0,23
2	Pesisir Selatan	580	6,17	1 320	5,16
3	Kabupaten Solok	536	5,70	1 171	4,58
4	Sijunjung	313	3,33	669	2,62
5	Tanah Datar	735	7,82	1 528	5,98
6	Padang Pariaman	684	7,28	1 691	6,61
7	Agam	691	7,35	1 413	5,53
8	Lima Puluh Kota	482	5,13	1 021	3,99
9	Pasaman	277	2,95	516	2,02
10	Solok Selatan	167	1,78	347	1,36
11	Dharmasraya	315	3,35	738	2,89
12	Pasaman Barat	432	4,60	989	3,87
13	Padang	2 443	25,99	9 774	38,22
14	Kota Solok	192	2,04	463	1,81
15	Sawahlunto	146	1,55	343	1,34
16	Padang Panjang	190	2,02	535	2,09
17	Bukittinggi	536	5,70	1 385	5,42
18	Payakumbuh	373	3,97	965	3,77
19	Pariaman	278	2,96	642	2,51
	Sumatera Barat	9 399	100,00	25 570	100,00

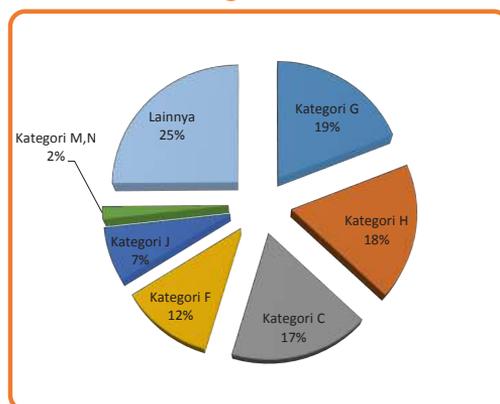
Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

Padang. Jika kita melihat rasio nya, rata-rata terdapat 4 orang tenaga kerja yang terdapat pada suatu perusahaan.

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut kategorinya, PDRB Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 2 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini belum terlalu besar kontribusinya pada perekonomian kota Padang.

Proporsi jumlah usaha pada sektor Jasa Perusahaan di kota Padang sebanyak 2,61 persen dari seluruh usaha yang ada di kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini pun sebesar 3,74 persen

Gambar 10.2.
Kontribusi PDRB Kota Padang Menurut Kategori, 2015



Sumber: PDRB Kota Padang (Tanpa Kategori A)

dari seluruh tenaga kerja non pertanian yang ada di kota Padang.

Tabel 10.2.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Padang
Menurut Kategori, 2015

No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha (%)	Jumlah Tenaga Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C. Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F. Konstruksi	0,84	4,91
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H. Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J. Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L. Real Estat	4,39	1,94
10	M,N. Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P. Pendidikan	2,49	12,32
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U. Jasa Lainnya	4,28	3,04
	PADANG	100,00	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode *shift share* disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor dengan pertumbuhan terhambat tetapi berkembang. Begitu juga dengan hasil perhitungan menggunakan metode MRP. Sektor ini tidak berpotensi baik di tingkat regional kota Padang maupun wilayah Sumatera Barat. Jika dilihat menggunakan metode klasen disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan dan tumbuh pesat jika dibandingkan dengan wilayah Sumatera Barat.

Sektor Jasa Perusahaan tidak termasuk prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hasil pendataan SE2016 memberikan informasi bahwa sektor ini masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lain. Peran serta pemerintah dalam menata kebijakan dan pembangunan pada sektor ini akan memberikan dampak pada pengentasan pengangguran di kota Padang.

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>



SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG:
JASA LAINNYA

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

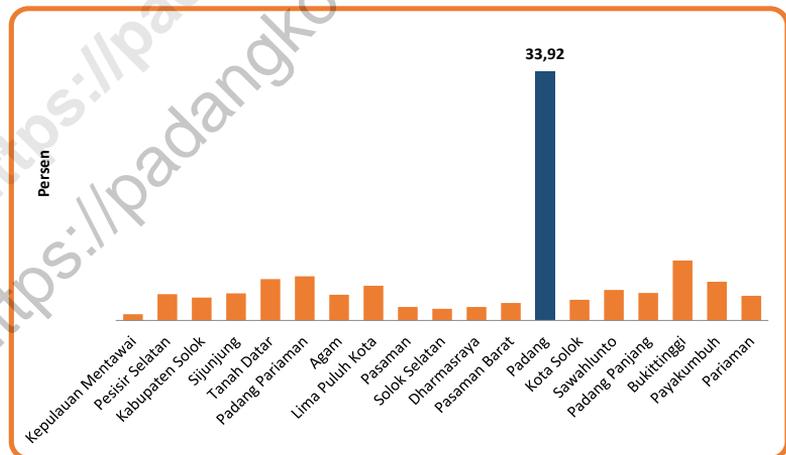
SEKTOR POTENSIAL KOTA PADANG: JASA LAINNYA

1. Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Jasa Lainnya

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang paling maju di Sumatera Barat dibandingkan daerah lainnya. Kota Padang memiliki keunggulan komparatif pada sektor Jasa Lainnya dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015, kota Padang berkontribusi dalam menciptakan PDRB sektor Jasa Lainnya di Sumatera Barat sebesar 33,92 persen. Nilai ini adalah yang tertinggi diantara daerah lainnya di Sumatera Barat.

Gambar 11.1.

Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Jasa Lainnya di Sumatera Barat, 2015 (persen)



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Jumlah usaha sektor Jasa Lainnya kota Padang menyumbang 22,49 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di Sumatera Barat. Dengan dominannya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 7.930 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor Jasa Lainnya di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat. Sebanyak 27,64 persen tenaga kerja pada sektor ini di Sumatera Barat terdapat pada kota Padang. Jika

Tabel 11.1.
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Jasa Lainnya Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persen (%)	Tenaga Kerja	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	93	0,52	127	0,44
2	Pesisir Selatan	963	5,40	1 230	4,29
3	Kabupaten Solok	908	5,09	1 387	4,83
4	Sijunjung	715	4,01	1 056	3,68
5	Tanah Datar	1 068	5,99	1 712	5,97
6	Padang Pariaman	1 116	6,26	1 618	5,64
7	Agam	1 415	7,93	1 845	6,43
8	Lima Puluh Kota	1 329	7,45	1 748	6,09
9	Pasaman	542	3,04	720	2,51
10	Solok Selatan	429	2,40	562	1,96
11	Dharmasraya	762	4,27	1 204	4,20
12	Pasaman Barat	1 140	6,39	1 957	6,82
13	Padang	4 012	22,49	7 930	27,64
14	Kota Solok	422	2,37	624	2,17
15	Sawahlunto	308	1,73	519	1,81
16	Padang Panjang	410	2,30	756	2,63
17	Bukittinggi	823	4,61	1 653	5,76
18	Payakumbuh	916	5,14	1 282	4,47
19	Pariaman	467	2,62	764	2,66
Sumatera Barat		17 838	100,00	28 694	100,00

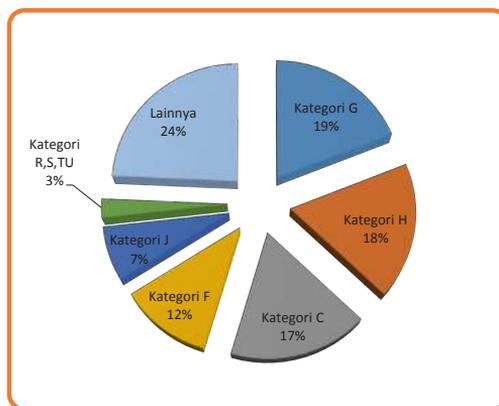
Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

kita melihat rasio nya, rata-rata terdapat 1 hingga 2 orang tenaga kerja yang terdapat pada suatu perusahaan.

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut kategorinya, PDRB Jasa Lainnya berkontribusi sebesar 3 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang (Gambar 11.2). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini belum terlalu besar kontribusinya pada perekonomian kota Padang.

Proporsi jumlah usaha pada sektor Jasa Lainnya di kota Padang sebanyak 4,28 persen dari seluruh usaha yang ada di kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat

Gambar 11.2.
Kontribusi PDRB Kota Padang Menurut Kategori, 2015



Sumber: PDRB Kota Padang (Tanpa Kategori A)

Tabel 11.2.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Padang
Menurut Kategori, 2015

No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha (%)	Jumlah Tenaga Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C. Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F. Konstruksi	0,84	4,91
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H. Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J. Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L. Real Estat	4,39	1,94
10	M,N. Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P. Pendidikan	2,49	12,32
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U. Jasa Lainnya	4,28	3,04
PADANG		100,00	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

pada sektor ini pun sebesar 3,04 persen dari seluruh tenaga kerja non pertanian yang ada di kota Padang.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode *shift share* disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor dengan daya saing rendah dan peranan terhadap wilayah Sumatera Barat juga rendah. Begitu juga dengan hasil perhitungan menggunakan metode MRP. Sektor ini tidak berpotensi baik di tingkat regional kota Padang maupun wilayah Sumatera Barat. Jika dilihat menggunakan metode *klassen* disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan jika

dibandingkan dengan wilayah Sumatera Barat.

Sektor Jasa Lainnya tidak termasuk prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hasil pendataan SE2016 memberikan informasi bahwa sektor ini masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lain. Peran serta pemerintah dalam menata kebijakan dan pembangunan pada sektor ini akan memberikan dampak pada pengentasan pengangguran di kota Padang.

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

12

bab



<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

SEKTOR LAINNYA

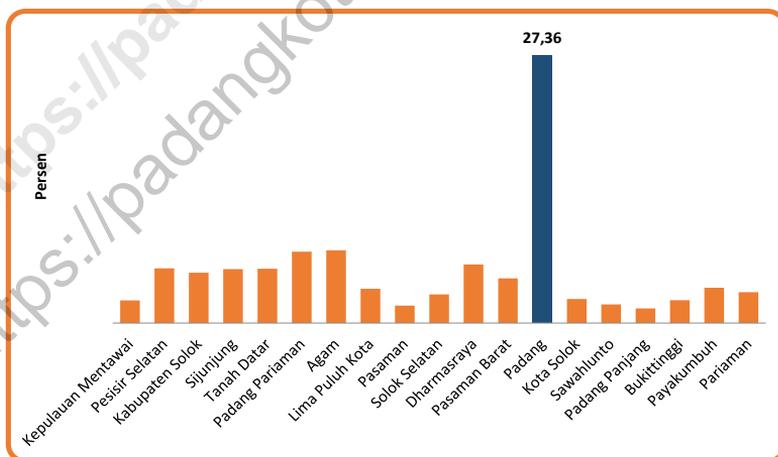
<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

Keunggulan Komparatif Kota Padang di Sektor Konstruksi

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang paling maju di Sumatera Barat dibandingkan daerah lainnya. Kota Padang memiliki keunggulan komparatif pada sektor Konstruksi dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015, kota Padang berkontribusi dalam menciptakan PDRB sektor Konstruksi di Sumatera Barat sebesar 27,36 persen. Nilai ini adalah yang tertinggi diantara daerah lainnya di Sumatera Barat.

Gambar 12.1.

Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Konstruksi di Sumatera Barat, 2015 (persen)



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (diolah)

*)PDRB Tanpa Kategori A

Jumlah usaha sektor Konstruksi kota Padang menyumbang 13,33 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di Sumatera Barat. Dengan dominannya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 12.812 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor Konstruksi di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat. Sebanyak 18,99 persen tenaga kerja pada sektor ini di Sumatera Barat terdapat pada kota Padang. Jika

Tabel 12.1.

Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persen (%)	Tenaga Kerja	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	27	0,46	651	0,96
2	Pesisir Selatan	371	6,32	4 326	6,41
3	Kabupaten Solok	439	7,48	5 151	7,63
4	Sijunjung	347	5,92	3 015	4,47
5	Tanah Datar	538	9,17	5 247	7,78
6	Padang Pariaman	275	4,69	2 535	3,76
7	Agam	489	8,34	3 360	4,98
8	Lima Puluh Kota	444	7,57	3 683	5,46
9	Pasaman	350	5,97	4 086	6,06
10	Solok Selatan	300	5,11	2 796	4,14
11	Dharmasraya	205	3,49	2 264	3,36
12	Pasaman Barat	362	6,17	3 357	4,98
13	Padang	782	13,33	12 812	18,99
14	Kota Solok	128	2,18	2 736	4,05
15	Sawahlunto	142	2,42	2 076	3,08
16	Padang Panjang	118	2,01	1 416	2,10
17	Bukittinggi	170	2,90	2 532	3,75
18	Payakumbuh	209	3,56	2 711	4,02
19	Pariaman	170	2,90	2 722	4,03
	Sumatera Barat	5 866	100,00	67 476	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

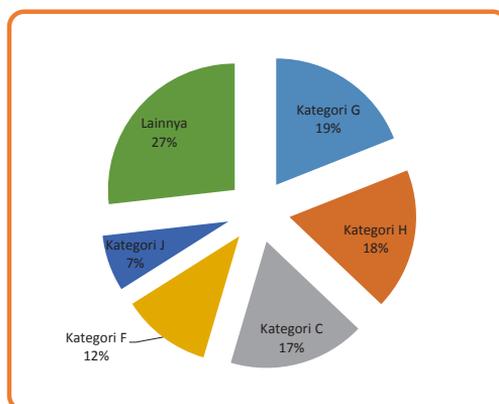
kita melihat rasio nya, rata-rata terdapat 16 hingga 17 orang tenaga kerja yang terdapat pada suatu perusahaan.

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut kategorinya, PDRB Konstruksi berkontribusi sebesar 12 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang (Gambar 12.2). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang cukup besar pada perekonomian kota Padang.

Proporsi jumlah usaha pada sektor Konstruksi di kota Padang sebanyak 0,84 persen dari seluruh usaha yang ada di kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini pun sebesar 4,91 persen dari seluruh tenaga kerja non pertanian

yang ada di kota Padang.

Gambar 12.2.
Kontribusi PDRB Padang Menurut Kategori, 2015



Sumber: PDRB Kota Padang
*JPDRB Tanpa Kategori A

Tabel 12.2.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Padang
Menurut Kategori, 2015

No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha (%)	Jumlah Tenaga Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C. Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F. Konstruksi	0,84	4,91
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H. Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J. Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L. Real Estat	4,39	1,94
10	M,N. Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P. Pendidikan	2,49	12,32
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U. Jasa Lainnya	4,28	3,04
	PADANG	100,00	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini bukan merupakan sektor yang unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode *shift share* disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor dengan pertumbuhan yang pesat. Begitu juga dengan hasil perhitungan menggunakan metode MRP. Sektor ini memiliki potensi baik di tingkat regional kota Padang maupun wilayah Sumatera Barat. Jika dilihat menggunakan metode klasen disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor potensial dan masih dapat dikembangkan.

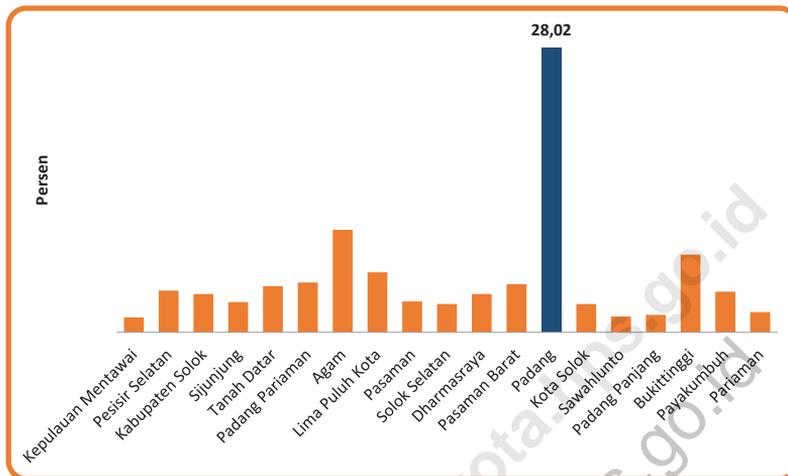
Sektor Konstruksi tidak termasuk prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hasil pendataan SE2016 memberikan informasi bahwa

sektor ini merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Melihat pada hasil perhitungan dengan metode klasen, pada kenyataannya sektor ini sudah menyerap banyak tenaga kerja namun masih belum termasuk klasifikasi unggulan. Peran serta pemerintah dalam menata kebijakan dan pembangunan pada sektor ini akan memberikan dampak pada pengentasan pengangguran di kota Padang.

2. Sektor Perdagangan sebagai Sektor Dominan di Kota Padang

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang paling maju di Sumatera Barat dibandingkan daerah lainnya. Kota Padang memiliki keunggulan komparatif pada sektor Perdagangan dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun

Gambar 12.3.
Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Perdagangan
di Sumatera Barat, 2015 (persen)



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (diolah tanpa kategori A)

Tabel 12.3.
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan di
Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

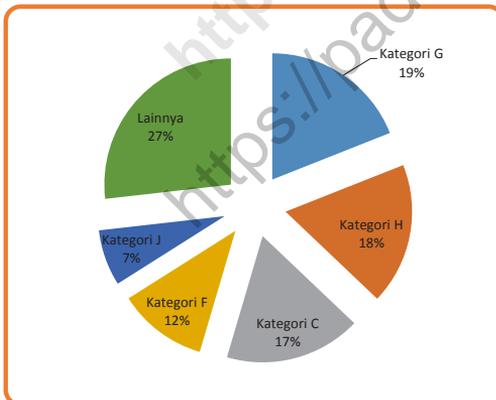
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persentase (%)	Tenaga Kerja	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	2 295	0,85	3 871	0,92
2	Pesisir Selatan	23 045	8,54	34 510	8,18
3	Kabupaten Solok	20 018	7,42	27 551	6,53
4	Sijunjung	15 129	5,61	21 384	5,07
5	Tanah Datar	19 313	7,16	26 769	6,34
6	Padang Pariaman	18 572	6,88	26 972	6,39
7	Agam	22 375	8,29	32 023	7,59
8	Lima Puluh Kota	19 688	7,30	27 074	6,42
9	Pasaman	13 570	5,03	20 096	4,76
10	Solok Selatan	7 841	2,91	11 153	2,64
11	Dharmasraya	11 918	4,42	17 988	4,26
12	Pasaman Barat	20 935	7,76	32 033	7,59
13	Padang	39 490	14,64	79 177	18,76
14	Kota Solok	4 410	1,63	7 605	1,80
15	Sawahlunto	3 196	1,18	4 851	1,15
16	Padang Panjang	3 416	1,27	5 446	1,29
17	Bukittinggi	11 471	4,25	21 536	5,10
18	Payakumbuh	8 265	3,06	14 007	3,32
19	Pariaman	4 834	1,79	7 958	1,89
	Sumatera Barat	269 781	100,00	422 004	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

2015, kota Padang berkontribusi dalam menciptakan PDRB sektor Perdagangan di Sumatera Barat sebesar 28,02 persen. Nilai ini adalah yang tertinggi diantara daerah lainnya di Sumatera Barat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12.3.

Jumlah usaha sektor Perdagangan kota Padang menyumbang 14,64 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di Sumatera Barat. Dengan dominannya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 79.177 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor Perdagangan di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat. Sebanyak 18,76 persen tenaga kerja pada sektor ini di Sumatera Barat terdapat pada kota Padang. Jika kita melihat rasio nya, rata-rata terdapat 2 orang tenaga kerja yang terdapat pada suatu perusahaan.

Gambar 12.4.
Kontribusi PDRB Kota Padang Menurut Kategori, 2015



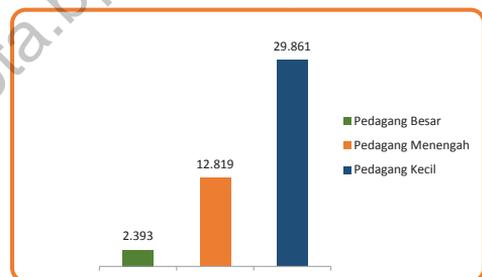
Sumber: PDRB Kota Padang (tanpa kategori A)

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut kategorinya, PDRB sektor Perdagangan berkontribusi sebesar 19 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki

kontribusi yang besar pada perekonomian kota Padang.

Tabel 12.4 memperlihatkan proporsi jumlah usaha pada sektor Perdagangan di kota Padang sebanyak 42,17 persen dari seluruh usaha yang ada di kota Padang. Jumlah ini adalah yang terbesar berdasarkan kategori diluar kategori pertanian. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini pun sebesar 30,32 persen dari seluruh tenaga kerja non pertanian yang ada di kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini juga adalah yang terbanyak diluar kategori pertanian.

Gambar 12.5
Jumlah Pedagang Menurut Kategori di Kota Padang, 2015



Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini bukan merupakan sektor yang unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode *shift share* disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor dengan daya saing rendah dan peranan terhadap wilayah juga rendah. Ini menunjukkan bahwa sektor ini masih belum berjalan dengan baik meskipun sebagian besar usaha dan tenaga kerja non pertanian berada pada sektor ini. Begitu juga dengan hasil perhitungan menggunakan metode MRP. Sektor ini tidak berpotensi baik di tingkat

Tabel 12.4.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Padang
Menurut Kategori, 2015

No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha (%)	Jumlah Tenaga Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C. Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F. Konstruksi	0,84	4,91
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H. Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J. Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L. Real Estat	4,39	1,94
10	M,N. Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P. Pendidikan	2,49	12,32
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U. Jasa Lainnya	4,28	3,04
PADANG		100,00	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

regional kota Padang maupun wilayah Sumatera Barat. Jika dilihat menggunakan metode kelas disimpulkan bahwa sektor ini bukan sektor potensial dan tertinggal.

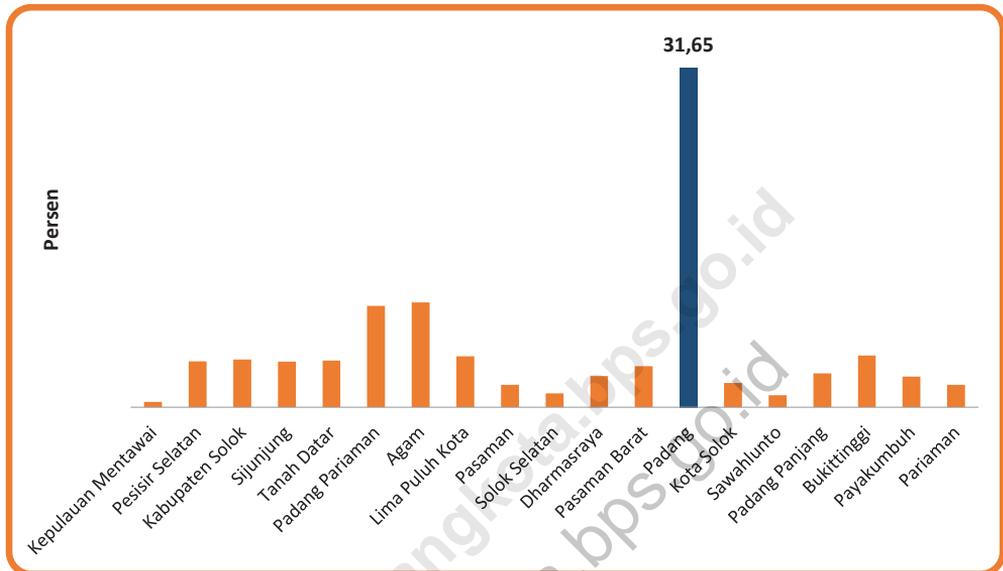
Sektor Perdagangan termasuk prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hasil pendataan SE2016 memberikan informasi bahwa sektor ini bukan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Namun hal ini dapat diperbaiki melalui peran serta pemerintah dalam menata kebijakan dan pembangunan pada sektor ini mengingat bahwa perdagangan adalah ciri khas yang melekat pada masyarakat Sumatera Barat khususnya kota Padang.

3. Sektor Pendidikan Penyedia Lapangan Kerja Sekaligus Pencetak Modal Manusia Unggul

Gambaran Umum Sektor Pendidikan

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di luar pulau Jawa yang sudah lama terkenal dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Disebutkan juga dalam Wikipedia Indonesia bahwa Universitas Andalas yang berada di Kota Padang adalah universitas tertua di luar Pulau Jawa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Kota Padang disebutkan bahwa salah satu misi pembangunan Kota

Gambar 12.6.
Kontribusi Kabupaten/Kota dalam Menciptakan PDRB Jasa Pendidikan
di Sumatera Barat, 2015 (persen)



Sumber: PDRB Provinsi Sumatera Barat (tanpa kategori A)

Padang adalah “Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan berdaya saing”. Untuk mencapai sasaran pada misi tersebut, diperlukan strategi pembangunan Kota Padang yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas guru dan dosen dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Penduduk merupakan unsur penting dalam menggerakkan proses pembangunan Kota Padang karena pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beradab. Sementara sumber daya manusia tersebut adalah salah satu faktor produksi utama yang dapat meningkatkan kegiatan produksi, baik barang maupun jasa. Pendidikan yang berkualitas dapat mendorong

penerapan dan pengembangan IPTEK yang merupakan unsur penting untuk dapat meningkatkan kegiatan produksi karena dapat mengefisienkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produksi. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan ekonomi yang bisa bertahan dan berkembang dalam era globalisasi hanyalah yang mempunyai daya saing tinggi.

Hasil Listing SE2016 mencatat sekitar 2.335 usaha kategori pendidikan di Kota Padang. Jumlah ini paling besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya karena didukung oleh posisi Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja pada kategori pendidikan di Kota Padang juga paling besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Tabel 12.5.
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Pendidikan di Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)	Persen (%)	Tenaga Kerja (orang)	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Mentawai	322	2,03	2 922	1,83
2	Pesisir Selatan	1 194	7,54	14 588	9,13
3	Kabupaten Solok	1 185	7,48	10 118	6,33
4	Sijunjung	774	4,89	5 626	3,52
5	Tanah Datar	1 282	8,10	11 017	6,89
6	Padang Pariaman	1 034	6,53	11 041	6,91
7	Agam	1 450	9,16	13 276	8,31
8	Lima Puluh Kota	1 023	6,46	9 337	5,84
9	Pasaman	847	5,35	6 875	4,30
10	Solok Selatan	525	3,32	5 461	3,42
11	Dharmasraya	649	4,10	5 535	3,46
12	Pasaman Barat	1 031	6,51	9 987	6,25
13	Padang	2 335	14,75	32 164	20,12
14	Kota Solok	268	1,69	3 122	1,95
15	Sawahlunto	327	2,07	1 124	0,70
16	Padang Panjang	293	1,85	3 141	1,97
17	Bukittinggi	480	3,03	6 001	3,75
18	Payakumbuh	504	3,18	5 053	3,16
19	Pariaman	309	1,95	3 437	2,15
	Sumatera Barat	15 832	100,00	159 825	100,00

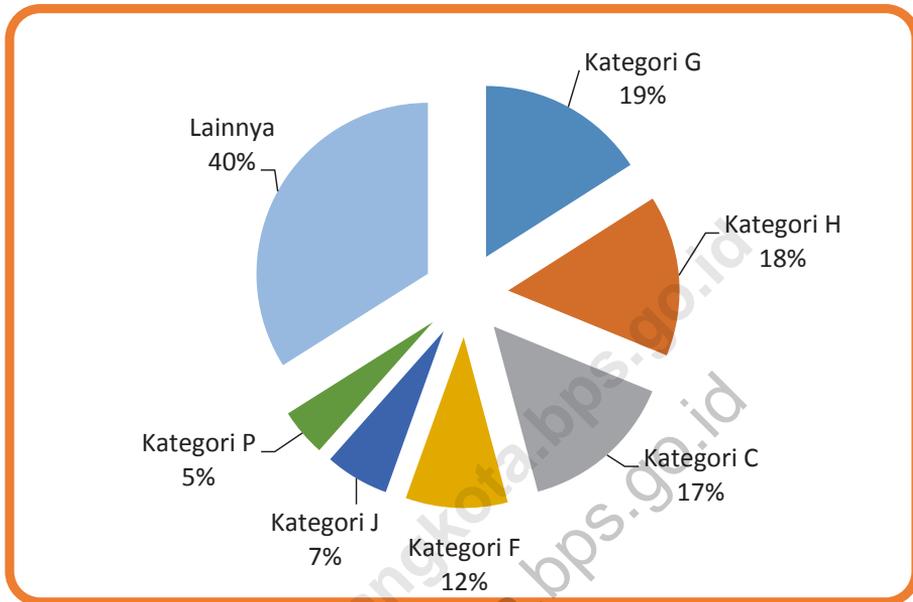
Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

Secara umum dapat dideskripsikan bahwa kategori pendidikan di Kota Padang bukanlah kategori utama penentu struktur ekonomi, tetapi memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Gambar 12.6 memperlihatkan kontribusi kategori pendidikan di Kota Padang mencapai 31,65 persen dari total PDRB kategori pendidikan Sumatera Barat.

Jumlah usaha sektor Pendidikan kota Padang menyumbang 14,75 persen dari seluruh usaha sektor ini yang ada di

Sumatera Barat. Dengan dominannya usaha pada sektor ini, terdapat sebanyak 32.164 orang tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Tenaga kerja sektor Pendidikan di kota Padang merupakan jumlah yang terbanyak di Sumatera Barat. Sebanyak 20,12 persen tenaga kerja pada sektor ini di Sumatera Barat terdapat pada kota Padang. Jika kita melihat rasio nya, rata-rata terdapat 13-14 orang tenaga kerja yang terdapat pada suatu perusahaan.

Gambar 12.7.
Kontribusi PDRB Kota Padang Menurut Kategori, 2015



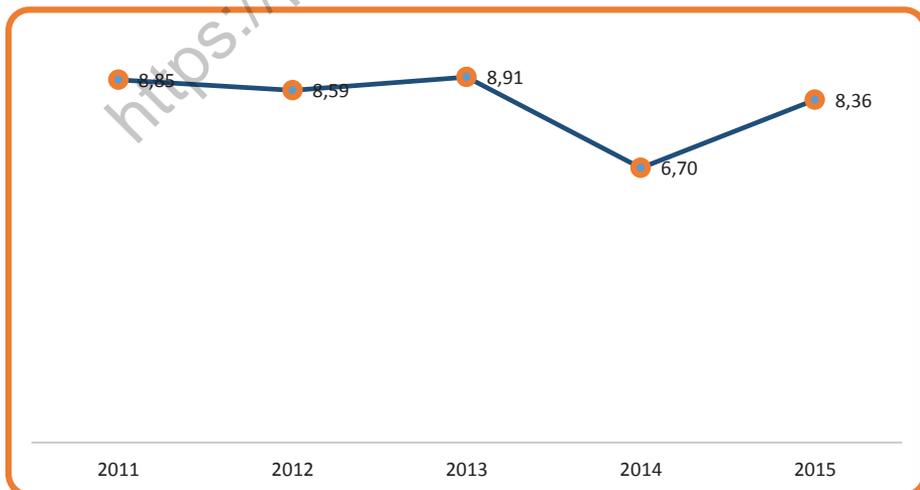
Sumber: PDRB Kota Padang (tanpa kategori A)

Peranan Sektor Pendidikan Dalam PDRB Kota Padang

Jika dilihat dari sisi PDRB menurut

kategorinya, PDRB Pendidikan berkontribusi sebesar 5,36 persen dalam pembentukan PDRB di kota Padang (Gambar 12.7). Meskipun sektor ini

Gambar 12.8.
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pendidikan Kota Padang, 2011-2015



Sumber: PDRB Kota Padang (tanpa kategori A)

Tabel 12.6.
Kontribusi Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kota Padang
Menurut Kategori, 2015

No	Kategori	Kontribusi (%)	
		Jumlah Usaha (%)	Jumlah Tenaga Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,73	1,53
2	C. Industri Pengolahan	10,57	13,27
3	F. Konstruksi	0,84	4,91
4	G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	42,17	30,32
5	H. Pengangkutan dan pergudangan	3,63	3,50
6	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,63	15,52
7	J. Informasi Dan Komunikasi	2,96	2,10
8	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,86	4,80
9	L. Real Estat	4,39	1,94
10	M,N. Jasa Perusahaan	2,61	3,74
11	P. Pendidikan	2,49	12,32
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,85	3,03
13	R,S,U. Jasa Lainnya	4,28	3,04
PADANG		100,00	100,00

Sumber: Hasil Listing SE2016 (diolah)

memiliki kontribusi yang tidak begitu besar pada perekonomian kota Padang, tetapi dilihat dari laju pertumbuhan PDRB sektor pendidikan termasuk sektor yang cukup berkembang. Hal ini terlihat dari perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kota Padang pada sektor pendidikan yang berada di atas laju pertumbuhan PDRB Kota Padang pada periode 2011, 2012, 2013 dan 2015 (Gambar 12.8).

Tabel 12.6 menunjukkan bahwa proporsi jumlah usaha pada sektor Pendidikan di kota Padang sebanyak 2,49 persen dari seluruh usaha yang ada di kota Padang. Jumlah ini termasuk yang rendah berdasarkan kategori diluar kategori pertanian. Tenaga kerja yang terdapat

pada sektor ini sebesar 12,32 persen dari seluruh tenaga kerja non pertanian yang ada di kota Padang. Tenaga kerja yang terdapat pada sektor ini juga adalah yang terbanyak keempat diluar kategori pertanian.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa sektor ini bukan merupakan sektor yang unggulan dalam penyerapan tenaga kerja, jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di Kota Padang. Dengan menggunakan metode *shift share* dan MRP disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor dengan pertumbuhan yang pesat, berpotensi di tingkat regional dan global, dan merupakan sektor potensial

serta masih dapat dikembangkan. Jika dilihat menggunakan metode klassen disimpulkan bahwa sektor ini termasuk sektor unggulan dan tumbuh pesat.

Sektor Pendidikan termasuk prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang 2014-2019. Hasil pendataan SE2016 memberikan informasi bahwa sektor ini termasuk sektor yang potensial untuk dikembangkan. Peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting artinya untuk dapat mewujudkan Kota Padang sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan di Sumatera Barat.

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>



Catatan Teknis

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

Catatan Teknis

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah ada beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

Pertama :

menentukan wilayah analisis (yang menjadi objek analisis) dan wilayah referensi atau wilayah yang lebih besar. Wilayah analisis Kota Padang dan wilayah referensi adalah Provinsi Sumatera Barat.

Kedua :

Dilakukan identifikasi sektor yang mungkin dapat dikelompokkan. Hal ini dilakukan karena beberapa data kategori sampai level provinsi jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu terdapat beberapa ketentuan penggabungan data kategori sektoral sebagai berikut:

- . Penggabungan sektoral berdasarkan kategori yang sejenis, misal untuk Sumatera Barat dilakukan penggabungan kategori, B,D,E ; M,N ; dan R,S,U.
- . Berdasarkan kontribusi sektoral dari PDRB dan Tenaga Kerja. Jika kedua indikator tersebut di bawah 5 persen digabung dengan sektor yang serumpun.

Ketiga :

Proses selanjutnya adalah pengukuran sektor unggulan. Beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain :

1. *Location Quotient (LQ)*

Analisis LQ digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan sektor perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang menjadi unggulan dan dapat dikembangkan di suatu wilayah. Disamping itu juga digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah.

Rumus untuk mendapatkan sektor unggulan di suatu wilayah analisis adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{S_{ij}/S_j}{S_{in}/S_n}$$

Keterangan:

S_{ij} : PDRB pada sektor i pada wilayah analisis j

S_j : PDRB pada wilayah analisis j

S_{in} : PDB pada sektor i di wilayah referensi

S_n : PDB di wilayah referensi

Jika berpijak pada data SE2016-L yang menghasilkan indikator jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja, maka PDRB pada rumus di atas dapat menggunakan jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja. Pengukuran LQ menghasilkan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $LQ > 1$, sektor i di wilayah analisis j merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi pada wilayah analisis tersebut daripada tingkat tingkat wilayah yang lebih luas lagi (wilayah referensi)
- b. Jika $LQ = 1$, sektor i di wilayah analisis j bukan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya sama dengan wilayah referensi.
- c. Jika $LQ < 1$, sektor i di wilayah analisis j bukan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada wilayah referensi.

2. Analisis *Shift-Share*

Analisis *shift share* merupakan salah satu teknik untuk menganalisis data statistik regional, seperti PDRB, tenaga kerja dan lain-lain untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif. Caranya dengan menitikberatkan pada pertumbuhan sektor di suatu wilayah dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dengan data yang terbatas (Firdaus, 2007). Analisis ini merupakan salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap

struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi.

Dalam metode ini terdapat 3 bagian yaitu:

- Regional Share* (RS) merupakan komponen share pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijakan nasional, yang berlaku.
- Proporsional Shift* (PS) komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut yang baik, dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat.
- Differential Shift* (DS) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.
- Shift Share* (SS) merupakan penjumlahan dari *Regional Share* dengan *Proportional Share* dan *Differential Share*

Jika ingin melihat keunggulan wilayah di suatu wilayah, maka keempat unsur tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$RS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right)$$

$$PS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{y_{it}}{y_{i0}} - \frac{Y_t}{Y_0} \right)$$

$$DS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{y_{ijt}}{y_{ij0}} - \frac{y_{it}}{y_{i0}} \right)$$

$$SS_{ij} = RS_{ij} + PS_{ij} + DS_{ij}$$

Keterangan:

- Y_t = PDRB wilayah referensi periode akhir tahun.
 Y_0 = PDRB wilayah referensi periode awal tahun.
 Y_{it} = PDRB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun akhir.
 Y_{i0} = PDRB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun awal.
 Y_{ijt} = PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun akhir.
 Y_{ij0} = PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun awal.

Interpretasi dari hasil pengukuran diatas sebagai berikut:

- o Jika $PS_{ij} > 0$, artinya bahwa sektor i pada suatu wilayah analisis tumbuh lebih cepat daripada sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- o Jika $DS_{ij} > 0$, artinya bahwa daya saing sektor i pada suatu wilayah analisis lebih tinggi dari daya saing sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- o Jika $SS_{ij} > 0$, artinya terjadi penambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja ekonomi daerah pada sektor i di wilayah analisis tersebut.

Dari ukuran di atas, maka sektor unggulan wilayah adalah sektor-sektor yang mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing suatu sektor menunjukkan potensi yang tinggi untuk dikembangkan.

3. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Metode MRP melakukan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). MRP membandingkan pertumbuhan suatu sektor pada suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih besar, baik dalam skala besar maupun kecil. Pada analisis ini terdapat dua rasio pertumbuhan yang bisa dihitung yaitu: rasio pertumbuhan wilayah study (RPs), dan rasio wilayah referensi (RPr). Jika ingin melihat sektor unggulan suatu pulau, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$RP_{ip} = \frac{(y_{ipt} - y_{ip0})/y_{ipt}}{(y_{pt} - y_{p0})/y_{p0}}$$

$$RP_{in} = \frac{(y_{int} - y_{in0})/y_{int}}{(y_{nt} - y_{n0})/y_{n0}}$$

Keterangan:

y_{ipt} = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun akhir.

y_{ip0} = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun awal.

y_{pt} = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun akhir.

y_{p0} = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun awal.

- Y_{int} = PDB sektor i wilayah referensi pada periode tahun akhir.
 Y_{ino} = PDR sektor i wilayah referensi pada periode tahun awal.
 Y_{nt} = PDB wilayah referensi pada periode tahun akhir.
 Y_{n0} = PDB wilayah referensi pada periode tahun awal.

MRP hanya memperhitungkan pertumbuhan sektor, tanpa melihat kontribusi suatu sektor di dalam suatu wilayah. Berikut interpretasi hasilnya:

- o Jika nilai RP_{ip} positif dan RP_{in} positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi sektor tersebut merupakan potensi baik di tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya)
- o Jika nilai RP_{ip} positif dan RP_{in} negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi sektor tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun secara global tidak berpotensi
- o Jika nilai RP_{ip} negatif dan RP_{in} positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi sektor tersebut merupakan potensi di tingkat global namun secara regional tidak berpotensi
- o Jika nilai RP_{ip} negatif dan RP_{in} negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi)

4. Tipologi *Klassen*

Tipologi *Klassen* mendasarkan pengelompokan suatu sektor di suatu wilayah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih luas dan membandingkan pangsa sektor tersebut dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih luas. Hasil analisis Tipologi *Klassen* akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor tersebut dalam membentuk perekonomian di suatu wilayah.

Untuk melihat potensi ekonomi di suatu wilayah digunakan pendekatan pertumbuhan sektoral dan kontribusinya terhadap perekonomian di suatu wilayah. Untuk pengukuran sektor potensial pada analisis ini menggunakan data PDRB harga konstan untuk pertumbuhan, PDRB harga berlaku untuk kontribusi. Melalui metode ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan dari sektor ekonomi yang berbeda, yaitu: sektor

unggulan dan tumbuh pesat, sektor unggulan tapi pertumbuhannya tertekan, sektor potensial yang berkembang cepat, dan sektor yang tidak potensial. Adapun matriks untuk menentukan tipe karakteristik untuk melihat sektor unggulan di tingkat wilayah analisis adalah sebagai berikut:

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$G_i \geq G$	$G_i < G$
$S_i \geq S$	Sektor unggulan dan tumbuh pesat	Sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan
$S_i < S$	Sektor potensial dan masih dapat dikembangkan	Bukan sektor potensial dan tertinggal

Keterangan:

- G_i : Pertumbuhan sektor i di wilayah analisis
- G : Pertumbuhan sektor i di wilayah referensi
- S_i : Kontribusi sektor i di wilayah analisis
- S : Kontribusi sektor i di wilayah referensi



Lampiran

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

PENGHITUNGAN I.O. JUMLAH TENAGA KERJA

(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	BDE Perta mbangan, Energi, Pengelola n Air dan Limbah	C. Industri Pengolahan	F. Konstruksi	G. Perdagangan Beser Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	H. Pengangkutan dan pergudangan	I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	J. Informasi Dan Komunikasi	K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	L. Real Estat	M/N. Jasa Perusahaan	P. Pendidikan	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	R,S,U. Jasa Lainnya	Total
[01] KEPULAUAN MENTAWAI	0,728	1,003	0,966	0,918	0,309	0,655	0,583	0,367	1,135	0,235	1,831	2,833	0,443	1,000
[02] PESIR SELATAN	0,564	0,738	0,920	1,174	0,770	1,013	0,908	0,643	0,405	0,741	1,310	0,790	0,615	1,000
[03] SOLOK	0,836	0,823	1,344	1,150	1,455	0,780	0,895	0,644	0,605	0,806	1,115	0,665	0,851	1,000
[04] SIJUNJUNG	3,563	0,687	1,032	1,170	0,857	0,892	0,770	0,784	0,691	0,604	0,813	0,884	0,850	1,000
[05] TANAH DATAR	0,352	1,118	1,161	0,947	1,806	0,930	1,266	1,086	0,583	0,892	1,029	0,732	0,891	1,000
[06] PADANG PARIAMAN	0,617	1,299	0,544	0,925	0,887	1,387	0,934	0,353	0,438	0,957	1,000	0,780	0,816	1,000
[07] AGAM	0,380	1,691	0,604	0,920	1,153	0,923	0,971	0,751	0,474	0,670	1,007	0,720	0,779	1,000
[08] LIMA PULUH KOTA	0,633	1,605	0,831	0,977	0,458	1,061	0,758	0,554	0,372	0,608	0,890	0,684	0,928	1,000
[09] PASAMAN	1,474	0,646	1,487	1,169	0,764	0,949	0,723	0,821	0,753	0,496	1,056	0,915	0,616	1,000
[10] SOLOK SELATAN	4,084	0,972	1,461	0,932	0,665	0,606	0,645	0,474	1,205	0,479	1,205	1,370	0,691	1,000
[11] DHARMASTRAYA	2,026	0,636	0,886	1,126	0,495	1,015	1,069	1,108	1,332	0,762	0,915	1,388	1,108	1,000
[12] PASAMAN BARAT	0,467	0,756	0,804	1,227	0,514	1,113	0,948	0,737	0,694	0,625	1,010	0,902	1,103	1,000
[71] PADANG	0,647	0,888	0,908	0,898	1,196	1,059	1,292	1,537	1,683	1,829	0,963	1,042	1,322	1,000
[72] SOLOK	0,528	0,586	2,068	0,919	1,333	0,864	0,886	1,754	1,614	0,923	0,996	1,812	1,109	1,000
[73] SAWAH LUNTO	7,902	0,916	1,878	0,702	1,195	0,765	1,087	1,086	1,087	0,819	0,429	1,241	1,104	1,000
[74] PADANG PANJANG	0,518	0,835	1,250	0,769	1,865	0,956	1,220	1,395	2,378	1,246	1,171	1,342	1,570	1,000
[75] BUKITTINGGI	0,337	0,738	0,830	1,129	0,959	0,932	0,986	1,398	1,881	1,049	0,831	1,713	1,274	1,000
[76] PAYAKUMBUH	0,535	1,134	1,117	0,923	0,617	0,969	0,883	1,838	1,743	1,049	0,879	1,085	1,242	1,000
[77] PARIAMAN	0,528	1,137	1,662	0,777	0,943	1,197	1,006	1,024	0,940	1,035	0,886	1,495	1,097	1,000
[XX] SUMATERA BARAT	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Shift Share	f_n	f_n	f_{ij}	N_{ij} (Regional Share/RS)	M_{ij} (Proportional Shift Share/PS)	C_{ij} (Differential Shift/DS)	D_{ij} (Shift Share/SS)	Kesimpulan dari tanda M_{ij}/PS dan C_{ij}/DS
KOTA PADANG	Pertumbuhan PDRB Sumatera	Pertumbuhan PDRB Per Kategori Sumbar	Pertumbuhan PDRB Per Kategori Padang	Perubahan PDRB per kategori di Padang karena pengaruh pertumbuhan ekonomi Sumbar	Perubahan PDRB Kategori yang cepat di Sumatera dan di Padang	Perubahan PDRB per kategori daerah karena kondisi daerah yang bersifat kompetitif	Sumbangan Kinerja	
B. D. E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	39,41	29,88	32,57	33.664.933	-8.136.775	2.298.153	27.826.311	
C. Industri Pengolahan		28,21	24,50	178.232.093	-50.651.292	-16.765.756	110.815.045	
F. Konstruksi		49,01	56,64	84.939.083	20.687.985	16.448.514	122.075.582	
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		36,50	31,03	182.045.580	-13.431.364	-25.270.573	143.343.642	
H. Transportasi dan Perhubungan		44,37	46,82	153.936.562	19.380.788	9.571.488	182.888.838	
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum		35,06	32,18	10.926.489	-1.206.075	-798.105	8.922.309	
J. Informasi dan Komunikasi		55,78	47,73	77.483.117	32.201.428	-15.838.103	93.846.441	
K. Jasa Keuangan dan Asuransi		40,40	44,79	49.052.588	1.234.053	5.467.334	55.753.975	
L. Real Estat		30,86	32,78	32.845.198	-7.123.019	1.597.449	27.319.629	
M.N. Jasa Perusahaan		33,75	34,46	15.266.056	-2.191.497	274.685	13.349.244	
P. Jasa Pendidikan		46,76	48,85	40.976.953	7.643.199	2.173.680	50.793.832	
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		46,90	47,38	14.117.316	2.685.243	171.940	16.974.499	
R.S.T.U. Jasa lainnya		34,23	30,89	21.059.190	-2.768.850	-1.781.715	16.508.624	
PDRB	39,41	38,34	38,34	894.545.157	0	-24.127.187	870.417.971	

MRP

KOTA PADANG	RP _{ip} Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi/Analisis (Padang)	RP _{in} Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (SumBar)
B.D.E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,849	0,758
C. Industri Pengolahan	0,639	0,716
F. Konstruksi	1,477	1,244
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,809	0,926
H. Transportasi dan Pergudangan	1,221	1,126
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,839	0,890
J. Informasi dan Komunikasi	1,245	1,416
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,168	1,025
L. Real Estat	0,855	0,783
M.N. Jasa Perusahaan	0,899	0,856
P. Jasa Pendidikan	1,274	1,187
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,236	1,190
R.S.T.U. Jasa lainnya	0,806	0,869
PDRB	1,000	1,000

Klassen

KOTA PADANG	Kontribusi PDRB di Padang (Si)	Kontribusi PDRB di Sumbar (S)	Pertumbuhan PDRB di Padang (Gi)	Pertumbuhan PDRB di Sumbar (G)
B.D.E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0,042	0,071	32,57	29,88
C. Industri Pengolahan	0,174	0,149	24,50	28,21
F. Konstruksi	0,115	0,132	56,64	49,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,190	0,214	31,03	36,50
H. Transportasi dan Pergudangan	0,181	0,171	46,82	44,37
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,014	0,017	32,18	35,06
J. Informasi dan Komunikasi	0,072	0,070	47,73	55,78
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,063	0,045	44,79	40,40

Rekap Hasil Kategori Unggulan Menurut Metode Penghitungan di Kota Padang, 2016

Kategori	LQ	Shift Share		MRP		Klassen	Keterangan	RPJMD
		Ps	Ds	RPip	RPin			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.D.E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	-	-	+	-	-	KW IV		
C. Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	KW II		
F. Konstruksi	-	+	+	+	+	KW IV	Potensi	
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	KW III		Ya
H. Pengangkutan dan pergudangan	+	+	+	+	+	KW I	Unggulan	Ya
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makanan Minum	+	-	-	-	-	KW III	Potensi	Ya
J. Informasi Dan Komunikasi	+	+	-	+	+	KW II	Unggulan	
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	+	+	+	+	+	KW I	Unggulan	
L. Real Estat	+	-	+	-	-	KW I	Potensi	
M,N. Jasa Perusahaan	+	-	+	-	-	KW I	Potensi	
P. Pendidikan	-	+	+	+	+	KW I	Potensi	Ya
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	+	+	+	+	+	KW IV	Unggulan	Ya
R,S,U. Jasa lainnya	+	-	-	-	-	KW II	Potensi	

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://padangkota.bps.go.id>
<https://padangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PADANG**

Jl. Raya By Pass KM 13 Kel. Sungai Sapih, Kec. Kuranji 25159
Telp.: (0751) 498515, Fax : (0751) 497515
Homepage: <http://padangkota.bps.go.id> E-mail: bps1371@bps.go.id

ISBN 978-602-0919-95-9



9 786020 919959 >